PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH
JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
PEKANBARU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pekanbaru, Maret 2023

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,

SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE,MM,CA,CRMP,QGIA
Pembina Utama Muda
NIP 19710729 199302 1 003

CamScanner

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2022



DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

JL. CUT NYAK DIEN NO. 3

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang atas berkat dan rahmat-Nya Dinas Pendidikan dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022. Laporan kinerja merupakan bagian dari upaya Dinas Pendidikan dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan pemenuhan kewajiban Dinas Pendidikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendidikan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam membantu Gubernur Riau, menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan. Laporan Kinerja tahun 2022 merupakan laporan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tahun akhir untuk periode perencanaan sesuai Renstra tahun 2019-2024. Laporan kinerja ini menyajikan tingkat pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja tahun 2022 Dinas Pendidikan. Selain capaian kinerja tahun 2022, laporan juga dilengkapi dengan analisis tingkat pencapaian tahun 2022 dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2019-2024 Dinas Pendidikan.

Tahun 2022 Dinas Pendidikan melaksanakan enam program pembangunan pendidikan. Melalui kerja keras dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, secara umum Dinas Pendidikan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dengan baik. Dinas Pendidikan sadar meskipun telah banyak capaian yang dihasilkan namun tantangan pembangunan di bidang pendidikan masih banyak dan memerlukan kerja lebih keras pada tahun–tahun mendatang.

Tantangan seperti memperbaiki layanan pendidikan bermutu sesuai dengan SPM dan SNP, membentuk insan Indonesia yang berkarakter dan beradab, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada Jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Dengan dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak, diharapkan tantangan dan masalah yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik.

Melalui laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberi gambaran objektif tentang kinerja yang telah dihasilkan Dinas Pendidikan dalam bidang pendidikan selama tahun 2022. Selain itu, semoga laporan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, bahan evaluasi, penyempurnaan dokumen perencanaan dan sebagai bahan masukan dalam perbaikan perumusan kebijakan bidang pendidikan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja tahun 2022 Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Pekanbaru,

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU

M. JOB KURNIAWAN, AP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19750528 199412 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL..... iv

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR GRAFIK..... vii

DAFTAR LAMPIRAN viii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 STRUKTUR ORGANISASI 1

1.3 TUGAS DAN FUNGSI 14

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI..... 15

1.5 PERMASALAHAN UTAMA 15

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 17

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024..... 17

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022..... 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 20

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 20

3.2 REALISASI ANGGARAN..... 58

BAB IV PENUTUP 61

4.1 KESIMPULAN UMUM 61

4.2 LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS 62

DAFTAR TABEL

TABEL		HALAMAN
1.1	Kondisi Pegawai berdasarkan Jabatan	12
1.2	Klasifikasi Pegawai menurut Pendidikan	13
1.3	Pemataan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	16
2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Riau	18
2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2022	19
3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	21
3.2	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	21
3.3	Target, Realisasi, Dan Capaian Kinerja APK SM Sederajat	23
3.4	APK SM Sederajat Provinsi Riau Tahun 2022	23
3.5	Target, Realisasi, Dan Capaian Kinerja APM SM Sederajat	25
3.6	APM SM Sederajat se Provinsi Riau Tahun 2022	26
3.7	Target, Realisasi, Dan Capaian Angka Putus Sekolah	27
3.8	Angka Putus sekolah se Provinsi Riau Tahun 2022	28
3.9	Target, Realisasi, Dan Capaian Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi Tahun 2022	30
3.10	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi se Provinsi Riau	30
3.11	Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	32
3.12	Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja APK SM Sederajat	33
3.13	Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja APM SM sederajat	33
3.14	Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Angka Putus Sekolah SM sederajat	34
3.15	Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Yang Terakreditasi	35
3.16	Realisasi kinerja tahun ini dengan target Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau	35

3.17 Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional 35
3.18 Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional
Angka Partisipasi kasar 38
3.19 Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional APM..... 39
3.20 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 40
3.21 Realisasi Kinerja dan Anggaran 46
3.22 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 48
3.23 Realisasi Keuangan dan Fisik Dinas Pendidikan Provinsi Riau..... 58
4.1 Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022..... 61

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR HALAMAN

1.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau 8

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK		HALAMAN
1.1	Kondisi Berdasarkan Jabatan	12
1.2	Klasifikasi Pegawai Menurut Pendidikan.....	13
3.1	APK Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau Tahun 2022.....	24
3.2	APM Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2022	26
3.3	Angka Putus Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun	28
3.4	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi	31
3.5	Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional APK.....	38
3.6	Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional APM.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan Provinsi Riau selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebagai sub sistem dari sistem Pemerintah Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, sudah menjadi kewajiban bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja setiap tahunnya. Dinas Pendidikan Provinsi Riau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dalam rangka pemenuhan dari ketentuan perundang- undangan.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

1.2.1 Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas:
   a. Kepala Dinas
   b. Sekretariat, terdiri atas:
      1. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
      2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
   c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA).
   d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
   e. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK).
   f. Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan.
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas,Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
3. Bidang dibantu oleh Pelaksana/Pejabat Fungsional.
4. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
5. Kepala Dinas Pendidikan merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a)
6. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a).
7. Kepala Subbagian merupakan Pejabat Pengawas (eselon lV.a).

1.2.2 Tugas dan Fungsi sesuai susunan organisasi

1. Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang pendidikan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, peleksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan.

3. Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.
4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
   a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas pendidikan.
   b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum.
   c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
   d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan
   e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya
5. Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas :
   a. penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   b. perencanaan program/kegiatan dan penggangaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   c. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pengelolaan keuangan, perlengkapan dan barang milik daerah;

d. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan antara lain meliputi penyiapan pembayaran gaji pegawai, dan kegiatan perbendaharaan lainnya.

e. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset, antara lain meliputi verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran, penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pencatatan aset dan kegiatan akuntansi lainnya.

f. penyusunan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah.

g. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi pengelolaan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Pendidikan.

h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan administrasi keuangan meliputi antara lain penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi pelaporan dan kegiatan administrasi keuangan lainnya;

i. pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan.

j. pelaksanaan proses administrasi Tuntuan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;

k. pengkoordinasian dan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;

l. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan.

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum Mempunyai Tugas :

a. penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Kepegawaian dan Umum.

b. perencanaan program/kegiatan dan penggangaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum.
c. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan kepegawaian dan umum.
d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Dinas Pendidikan;
e. pelaksanaan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
f. pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
g. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Dinas Pendidikan;
h. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Dinas Pendidikan;
i. pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;
j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
k. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

7. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas

a. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas menyelenggarakan tugas terkait penetapan kurikulum, pelaksanaan kurikulum dan pembangunan karakter peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas menyelenggarakan fungsi :

- pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan pembinaan Sekolah Menengah Atas dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait.
- pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan penetapan kurikulum Sekolah Menengah Atas.
- pelaksanaan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kurikulum serta pembangunan karakter peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas;
- pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Atas;
- penyususan bahan penertiban izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Atas;
- pelaksaan Koordinas, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan Pelaporan Pelaksaan Pembinaan sekolah Menengah Atas Pada Kepala Sekolah Se Provinsi Riau pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
   a. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan menyelenggarakan tugas terkait penetapan kurikulum, pelaksanaan kurikulum dan pembangunan karakter peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
   b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan menyelenggarakan fungsi.
      - pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
      - penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
      - pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Sekretariat Daerah (BiroKesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait.
      - pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan penetapan kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan.
      - pelaksanaan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kurikulum serta pembangunan karakter peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
      - pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Kejuruan;
      - penyususan bahan penertiban izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Kejuruan;
      - pelaksaan Koordinas, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan Pelaporan Pelaksaan Pembinaan sekolah Menengah Kejuruan Pada Kepala Sekolah Se Provinsi Riau.
      - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.
   a. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus menyelenggarakan tugas terkait penetapan kurikulum, pelaksanaan kurikulum dan pembangunan karakter peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.
   b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan layanan Khusus menyelenggarakan fungsi :
      - pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaranBidang Pembinaan Pendidikan Khusus danPendidikan Layanan Khusus;
      - penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.
      - pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan pembinaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait.
      - pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan penetapan kurikulum Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.
      - pelaksanaan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kurikulum serta pembangunan karakter peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.
      - pelaksaan Koordinas, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan Pelaporan Pelaksaan Pembinaan sekolah Menengah Kejuruan Pada Kepala Sekolah Se Provinsi Riau.
      - penyususan bahan penertiban izin pendirian, penataan, dan penutupan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.
      - pelaksaan Koordinas, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan Pelaporan Pelaksaan Pembinaan sekolah Khusus dan Sekolah Layanan Khusus Pada Kepala Sekolah

Luar Biasa (SLB) Se Provinsi Riau.

- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Kepala Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan

a. Kepala Bidang Pendataan dan pengembangan pendidikan mempunyai tugas pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Data Pendidik, Pengembangan Kebijakan Pendidikan dan tugas pembantuan, fasilitasi dan kerjasama pendidikan

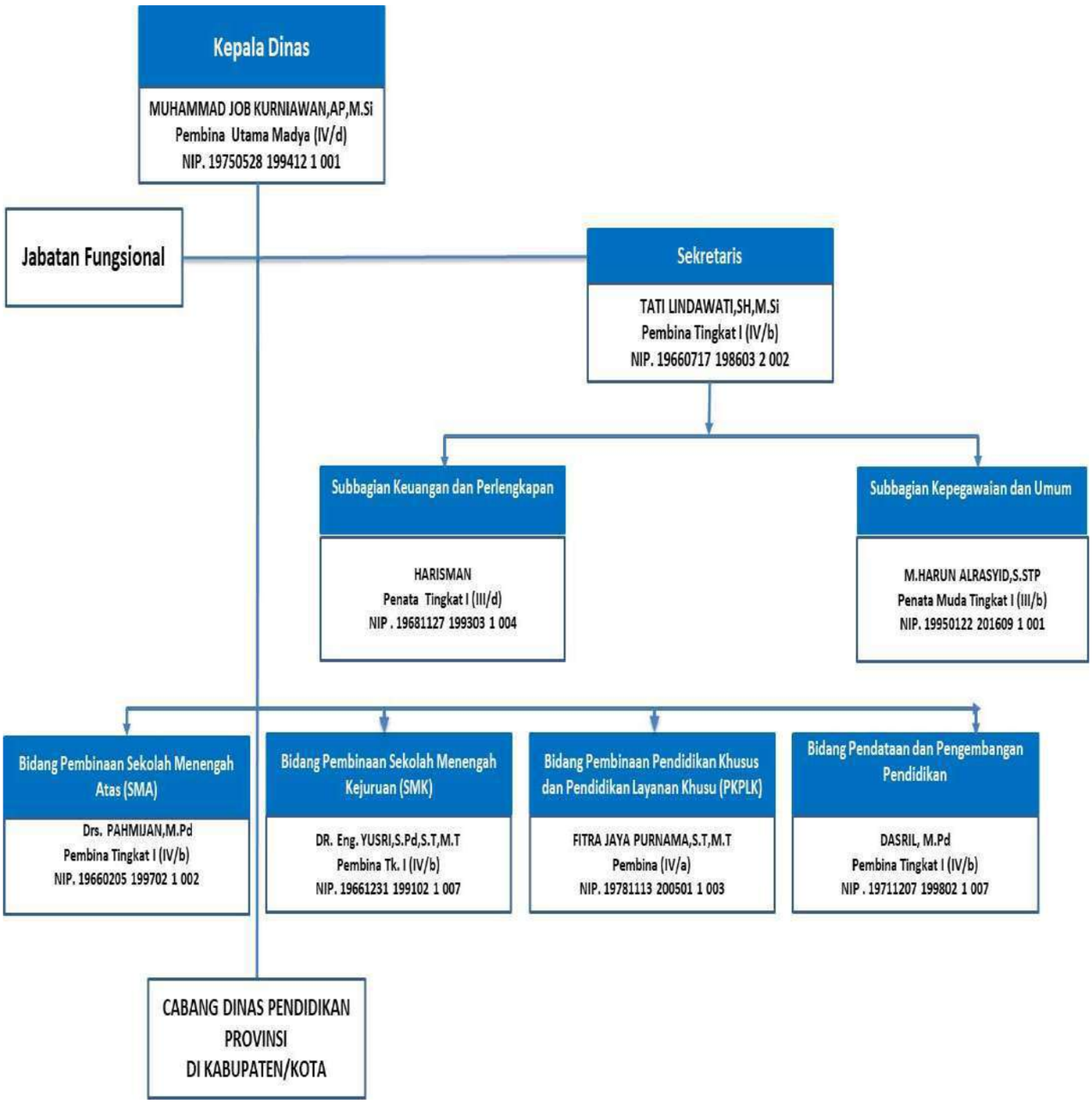
b. Untuk melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pendataan dan pengembangan Pendidikan menyelenggaraan fungsi;

- pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan;
- penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan;
- pelaksanaan koordinasi penyusunan bahanperumusan kebijakan Pendataan dan PengembanganPendidikan dengan Sekretariat Daerah (BiroKesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait.
- penyususan bahan perumusan koordinasi, analisis, sinkronisasi dan neraca pendidikan daerah;
- pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Data Pendidik, Pengembangan Kebijakan Pendidikan dan tugas pembantuan, fasilitasi dan kerjasama pendidikan;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, pembangunan dan kebijakan perencanaan, pembangunan dan pengembangan pendidikan, serta pelaksanaan tugas pembantuan, fasilitasi dan kerjasama pendidikan;
- pelaksanaan penyebarluasan informasi data pokok pendidikan dan profil pendidikan Provinsi Riau;
- penyususan kalender pendidikan;

- pelaksaan Koordinas, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan Pelaporan Pelaksaan Pembinaan Sekolah Menengah dan Sekolah Khusus dan Sekolah Layanan Khusus Pada Kepala Sekolah SMA/SMK dan SLB Se Provinsi Riau
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

1.2.3 Gambar Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau



1.2.4 Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan Provinsi Riau

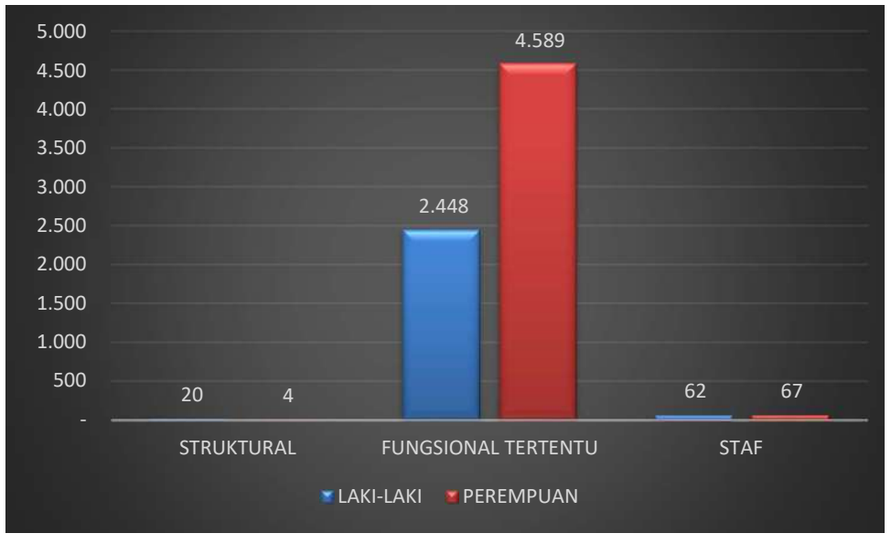
Sumber Daya Manusia merupakan modal yang paling berharga serta merupakan aset yang paling penting dan sangat diperhatikan dalam organisasi. Hal ini karena kinerja suatu organisasi dapat dipengaruhi oleh kualitas SDM yang ada. Sumber daya manusia/personil di Dinas Pendidikan terdiri dari 7.612 pegawai termasuk guru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Kondisi Pegawai berdasarkan Jabatan

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH PNS BERDASARKAN							
		STRUKTURAL				JUMLAH	FUNGSIONAL TERTENTU	STAF	JUMLAH
		I	II	III	IV				
1	LAKI-LAKI	-	1	8	11	20	2.448	62	2.510
2	PEREMPUAN	-	-	1	3	4	4.589	67	4.656
			1	9	14	24	7.037	129	7.166

Grafik 1.1

Kondisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



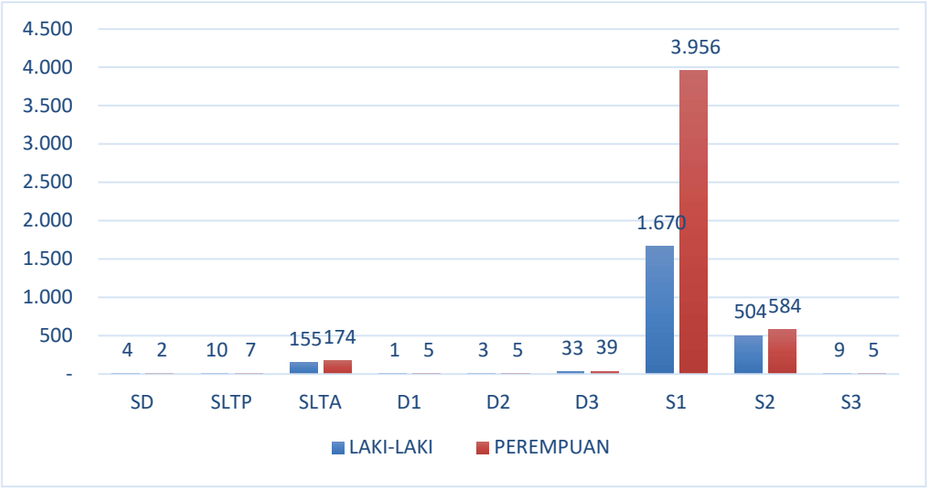
sumber data : (Dinas Pendidikan Provinsi Riau)

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diketahui bahwa PNS pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau didominasi oleh jabatan fungsional tertentu yaitu guru dan pengawas sebanyak 7.166 orang, dan Jabatan Struktural sebanyak 24 orang.

Tabel 1.2
Klasifikasi Pegawai menurut Pendidikan

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN								
		SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	JUMLAH
1	LAKI-LAKI	4	10	155	1	3	33	1.670	504	9	2.389
2	PEREMPUAN	2	7	174	5	5	39	3.956	584	5	4.777
	JUMLAH	6	17	329	6	8	72	5.626	1.088	14	7.166

Grafik 1.2
Klasifikasi Pegawai Menurut Pendidikan



(sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau)

Dari data pada tabel 1.2 diketahui bahwa pendidikan PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana Strata 1 (S.1) yang berjumlah 5.626 orang dan SMA Sederajat berjumlah 329 orang. Jika dilihat dari PNS yang memiliki tingkat pendidikan S2 dan S3 adalah sebanyak 1.102 orang dari seluruh PNS Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Hal ini menggambarkan tingkat pendidikan pegawai negeri sipil Dinas Pendidikan Provinsi Riau sudah cukup baik.

1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tugas Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Riau

1. Dinas Pendidikan bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepala Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 1 Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
   a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan;
   b. Pelaksanaan kebijakan pada sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan;
   c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan
   d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan dan
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Peran strategis Dinas Pendidikan Provinsi Riau sesuai dengan kewenangannya, maka ditetapkan isu-isu strategis Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebagai berikut:

1. Masih adanya Kesenjangan Aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat di daerah ataupun di perkotaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan fasilitas pendidikan, kesulitan menjangkau lokasi pendidikan dan rendahnya kemampuan ekonomi orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.
2. Masih adanya Kesenjangan Kualitas pendidikan antara perkotaan dengan di daerah. Hal ini disebabkan perbedaan ketersediaan fasilitas pendidikan dan belum meratanya penyebaran guru dan Penerapan kurikulum 2013 yang belum maksimal
3. Belum terdapatnya kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan.
4. Rendahnya kuantitas dan kualitas sarpras pendidikan menengah terutama kejuruan
5. Belum optimalnya pendataan semua Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) usia sekolah berkesempatan menikmati layanan pendidikan yang sesuai
6. Terbatasnya jumlah tenaga pendidik.

1.5 PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan yang ditemukan tentu perlu menjadi bahan antisipasi agar dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan hingga akhir periode Renstra Dinas Pendidikan dapat menjadi lebih baik. Adapun permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan Pendidikan terdapat pada table 1.3 sebagai berikut :

Tabel 1.3
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum meratanya akses pendidikan	Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan	Masih terbatasnya daya tampung pendidikan menengah dan layanan khusus
			Masih rendahnya kualitas ruang kelas
		Masih terdapat calon peserta didik/ peserta didik yang sulit menjangkau akses layanan pendidikan	Masih terbatasnya pembiayaan operasional sekolah yang dianggap memberatkan peserta didik
			Masih terdapat daerah yang secara teknis belum dapat didirikan sekolah menengah
2.	Masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan	Masih rendahnya kualitas pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik	Masih rendahnya kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
			Belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
			Belum optimalnya pengembangan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik
		Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang dan utilitas pendidikan	Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang dan utilitas pendidikan menengah
			Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang dan utilitas pendidikan khusus
		Belum Optimalnya Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan	Belum optimalnya kerjasama pendidikan kejuruan dengan Dunia Usaha Dunia Industri
			Masih rendahnya manajemen sekolah berbasis vokasi
			Masih belum terpenuhinya sarana prasarana sekolah sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dengan adanya perencanaan kinerja ini maka konsepsi organisasi menjadi jelas dan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta dapat mengarahkan sumber-sumber organisasi secara efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan kinerja dapat menentukan keberhasilan organisasi.

Pemerintah Provinsi Riau mengambil alih pengelolaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) dari Pemerintah Kabupaten/kota. Hal itu merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dicantumkan soal pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa menyebutkan manajemen pengelolaan SMA/SMK berada di tangan pemerintah provinsi. Sementara pemerintah Kabupaten/Kota hanya menangani Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Sehingga Pemerintah Provinsi Riau merubah RPJMD dan mengacu pada perubahan RPJMD, Dinas Pendidikan membuat Renstra untuk Periode Tahun 2019-2024.

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024

Tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Riau antara lain:

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk merealisasikan misi Kepala Daerah, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2019-2024 yang lebih jelas guna menggambarkan ukuran- ukuran terlaksananya misi Kepala Daerah.

1.1 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan strategis Dinas Pendidikan tahun 2019-2024 adalah **"Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat"**.

Adapun Indikator program Sasaran/kinerja adalah sebagai berikut :

- Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)

- Harapan Lama Sekolah (tahun)

1.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Riau (2019-2024)

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024. Sasaran strategis Dinas Pendidikan Provinsi Riau adalah :

1. Meningkatkan Pemerataan Akses Pendidikan
   - Adapun Indikator Sasaran/kinerja adalah sebagai berikuit:
     1) APK SM Sederajat
     2) APM SM Sederajat
     3) Angka Putus Sekolah SM Sederajat
2. Meningkatkan Mutu dan Relevansi Pendidikan.
   - Adapun Indikator Sasaran/ kinerja adalah sebagai berikut :
     - Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Riau

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
			2020*)	2021*)	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat		Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9.14	9,19	9.24-9.30	9.29-9.35	9.35-9.40
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,2	13,28	13.37-13.47	13.44-13.53	13.44-13.60
	Meningkatnya Pemerataan Akses Pendidikan	- APK SM Sederajat	84,61	88,9	90,4	91,9	92,4
		- APM SM Sederajat	64,01	64	66,36	67,88	68
		- Angka Putus Sekolah SM Sederajat	0,76	0,94	0,74	0,73	0,7
	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan	- Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi	93,32	93,71	94,12	94,52	94,92

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan tahun 2019-2024 dan sumber daya anggaran (murni) yang ada, Disdik telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2022. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode.

Isi dari perjanjian kinerja tahun 2022 Dinas Pendidikan Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS PERUBAHAN	INDIKATOR KINERJA PERUBAHAN	TARGET PERUBAHAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akses Pendidikan	1. APK SM Sederajat	90,40
		2. APM SM Sederajat	66,36
		3. Angka Putus Sekolah SM Sederajat	0,74
2	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi	94,12

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.1.085.534.541.869.00	APBD
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp .1.202.769.155.022.00	APBD
3	Program Pengembangan Kurikulum	Rp 506.578.630,00	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas pendidikan Provinsi Riau selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2022 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau dengan Gubernur Riau. Penilaian terhadap perjanjian kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan program dan kegiatan dengan mengevaluasi dan mengukur kinerja. Ukuran kinerja dilakukan dengan pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan evaluasi. hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2) Hasil Sedang : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3.1.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya Akses Pendidikan	1	APK SM Sederajat	90,40	90,11	99,68
		2	APM SM Sederajat	66,36	66,43	100,11
		3	Angka Putus Sekolah SM Sederajat	0,74	0,05	1480,00
2	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan	1	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi	94,12	92,59	98,37

3.1.1.1 Capaian Kinerja Organisasi

A. Meningkatnya akses Pendidikan

Dalam meningkatkan akses Pendidikan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Riau untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global, serta meningkatkan peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) hingga mencapai posisi sama dengan atau lebih baik dari peringkat IPM periode sebelumnya. Untuk itu, sampai dengan tahun 2022 dilakukan upaya-upaya sistematis dalam pemerataan dan perluasan pendidikan. Pembangunan pendidikan di Provinsi Riau senantiasa perlu terus ditingkatkan, agar dapat selaras dengan tiga pilar pembangunan pendidikan nasional.

Tingkat ketercapaian sasaran strategis Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus diukur/dilihat dari tingkat ketercapaian indikator kinerja utama yang ada dalam perjanjian kinerja, yaitu:

1. APK SM Sederajat.
2. APM SM Sederajat
3. Angka Putus Sekolah SM Sederajat

Adapun target dan pencapaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SM Sederajat

Indikator APK SM Sederajat digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran pemerataan dan akses pendidikan menengah, dicapai melalui program pendidikan menengah dan Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\frac{\text{Jumlah siswa SM Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 } - \text{ 18 Tahun}} X\ 100\%$$

Tabel 3.3
Target, Realisasi, Dan Capaian Kinerja APK SM Sederajat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kineja	apaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akses Pendidikan	1. APK SM Sederajat	90,4	90,11	99,68

Meningkatnya akses Pendidikan merupakan sasaran strategis untuk mendukung tercapainya tujuan Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat. Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran str ategis ini dilihat melalui IKU "APK SM Sederajat".

Capaian Kinerja tahun 2022 sebesar 99,68% dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja sangat tinggi dan dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Meningkatnya akses Pendidikan pada tahun 2022 berhasil dicapai.

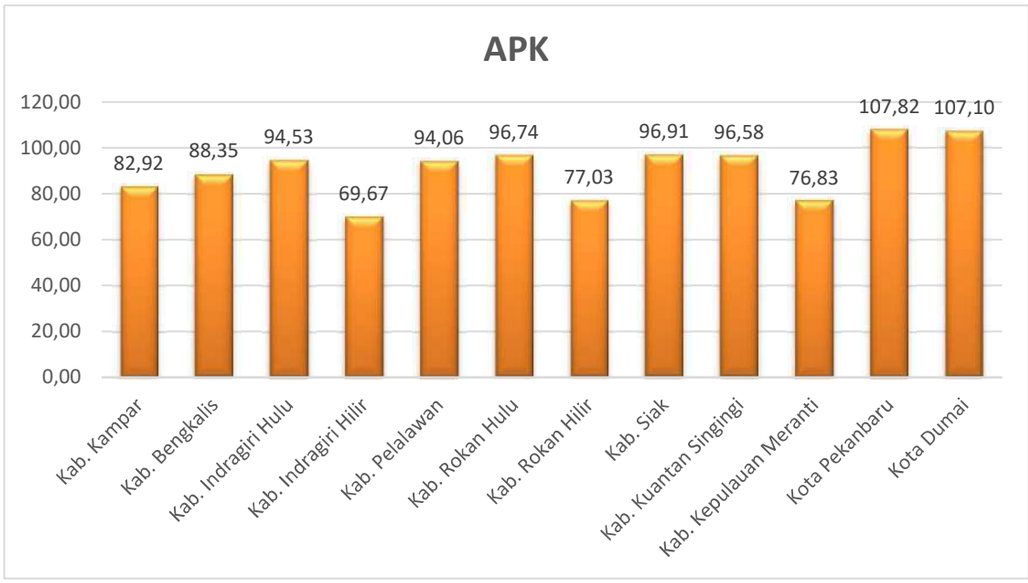
Berikut pencapaian angka partisipasi kasar APK SM Sederajat Provinsi Riau tahun 2022 terlihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.4
APK Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten/Kota
se Provinsi Riau Tahun 2022

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk 16-18 Tahun	Jumlah siswa keseluruhan	APK %
1	Kab. Kampar	47.650	39.509	82,92
2	Kab. Bengkalis	37.731	33.335	88,35
3	Kab. Indragiri Hulu	23.214	21.945	94,53
4	Kab. Indragiri Hilir	41.678	29.037	69,67
5	Kab. Pelalawan	19.785	18.610	94,06
6	Kab. Rokan Hulu	28.647	27.712	96,74
7	Kab. Rokan Hilir	45.632	35.152	77,03
8	Kab. Siak	26.022	25.219	96,91
9	Kab. Kuantan Singingi	16.748	16.175	96,58
10	Kab. Kepulauan Meranti	10.943	8.408	76,83
11	Kota Pekanbaru	60.816	65.570	107,82
12	Kota Dumai	15.834	16.959	107,10
	Provinsi Riau	**374.700**	**337.631**	**90,11**

Sumber : Data Referensi Kemdikbud

Grafik 3.1
APK Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten/KotaSe Provinsi Riau
Tahun 2022



Sumber : Data Referensi Kemdikbud

Tabel 3.4 dan grafik 3.1 tersebut menunjukkan ada 5 (lima) Kabupaten/Kota yang capaian APK berada dibawah rata-rata APK Provinsi, yaitu Kabupaten Indragiri Hilir (69,67%), Kabupaten Rokan Hilir (77,03%), dan Kabupaten Kep.Meranti (76,83%) dengan capaian terendah adalah Kabupaten Indragiri Hilir sedangkan capaian tertinggi adalah Kota Pekanbaru (107,82%). Dengan demikian intervensi pembangunan pendidikan dalam rangka mencapai sasaran strategis pemerataan dan akses layanan pendidikan menengah yang seharusnya mendapat prioritas utama terhadap program dan kegiatan adalah Kabupaten Indragiri Hilir , Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti.

2. Angka Partisipasi Murni (APM) SM Sederajat.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

APM digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. APM dapat dihitung dengan

$$\frac{\text{Jumlah siswa SM sederajat Usia 16 – 18 Th}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 – 18 Tahun}} \text{ X } 100\%$$

menggunakan rumus sebagai berikut:

Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Sederajat digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran pemerataan dan akses pendidikan menengah, dicapai melalui program pendidikan menengah dan program pembangunan sekolah terpadu, dengan kegiatan antara lain pembangunan ruang kelas baru dan pembangunan unit sekolah baru.

Untuk mengukur ketercapaian indikator ini diperlukan data Jumlah siswa Sekolah Menengah Sederajat Usia 16-18 Tahun dan jumlah penduduk usia 16–18 Tahun. Indikator APM SM Sederajat diperoleh dengan cara membagi Jumlah siswa SM Sederajat Usia 16-18 Tahun dengan jumlah penduduk usia 16 – 18 Tahun dikalikan 100%.

Berdasarkan data dari Data Referensi Pendidikan Kemendikbud RI, tahun 2022 siswa SM Sederajat Usia 16-18 Tahun di Provinsi Riau berjumlah 374.700 dan jumlah penduduk berusia 16–18 Tahun berjumlah 248.899 jiwa, dengan demikian APM SM sederajat Provinsi Riau adalah 66,43%. Dan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Target, Realisasi, Dan Capaian
APM Sekolah Menengah Sederajat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kineja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akses Pendidikan	APM SM Sederajat	66,36	66,43	100,11

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Meningkatnya akses Pendidikan merupakan sasaran strategis untuk mendukung tercapainya tujuan Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat. Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui IKU "APM SM Sederajat".

Capaian Kinerja tahun 2022 sebesar 100,11% dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja sangat tinggi dan dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Meningkatnya akses Pendidikan pada tahun 2022 berhasil dicapai.

Berikut pencapaian APM SM Sederajat Provinsi Riautahun 2022 terlihat pada tabel dan grafik berikut:

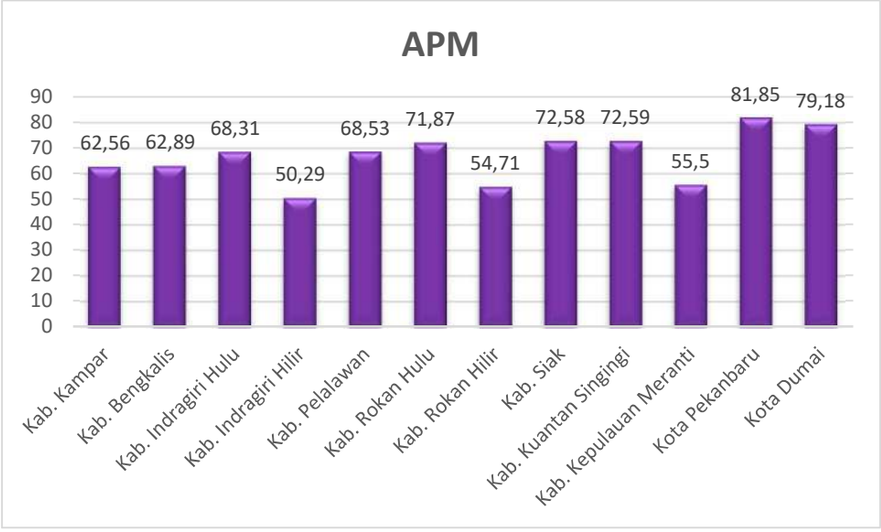
Tabel 3.6
APM Sekolah Menengah Sederajat
Kabupaten Kota
se Provinsi Riau Tahun 2022

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk 16-18 Tahun	Jumlah siswa Usia 16-18 Tahun	APM %
1	Kab. Kampar	47.650	29.808	62,56
2	Kab. Bengkalis	37.731	23.730	62,89
3	Kab. Indragiri Hulu	23.214	15.858	68,31
4	Kab. Indragiri Hilir	41.678	20.960	50,29
5	Kab. Pelalawan	19.785	13.558	68,53
6	Kab. Rokan Hulu	28.647	20.588	71,87
7	Kab. Rokan Hilir	45.632	24.965	54,71
8	Kab. Siak	26.022	18.887	72,58
9	Kab. Kuantan Singingi	16.748	12.157	72,59
10	Kab. Kepulauan Meranti	10.943	6.073	55,5
11	Kota Pekanbaru	60.816	49.777	81,85
12	Kota Dumai	15.834	12.538	79,18
	Provinsi Riau	**374.700**	**248.899**	**66,43**

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Grafik 3.2

APM Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2022



Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Dari tabel 3.6 dan grafik 3.2 tersebut diatas terdapat 3 (tiga) Kabupaten/kota yang realisasi capaian APM SM Sederajat berada jauh di bawah rata-rata APM Provinsi yaitu Kabupaten Indragiri Hilir (50,29%), Kabupaten Rokan Hilir (54,71%) dan Kabupaten Kepulauan Meranti (55,50%) dengan capaian APM terendah adalah Kabupaten Indragiri Hilir sedangkan realisasi capaianAPM SM Sederajat tertinggi adalah Kota Pekanbaru (81,85%).

3. Angka Putus Sekolah SM sederajat

Angka Putus Sekolah (APtS) adalah Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 16-18 tahun tingkat SMA sederajat.

APtS dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah siswa SM Sederajat}}{\text{Jumlah seluruh siswa SM Sederajat}} \text{ X } 100\%$$

Dan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7

Target, Realisasi, Dan Capaian
Angka Putus sekolah Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kineja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akses Pendidikan	Angka Putus Sekolah SM Sederajat	0,74	0,05	1480

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Capaian Kinerja tahun 2022 sebesar 1.480% dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja sangat tinggi dan dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan La yanan Khusus pada tahun 2022 berhasil dicapai.

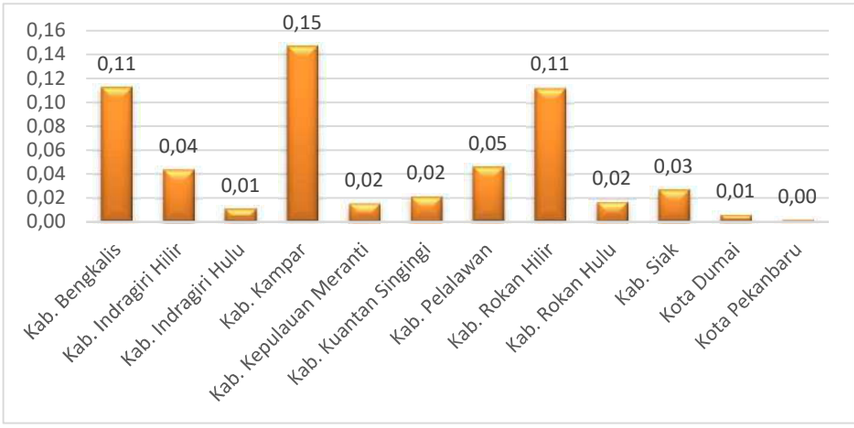
Berikut pencapaian Angka Putus Sekolah SM Sederajat Provinsi Riau tahun 2022 terlihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.8
Angka Putus Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten Kota se Provinsi Riau Tahun 2022

NO	Kabupaten	Jumlah siswa putus sekolah SMA dan SMK	Jumlah siswa keseluruhan SMA dan SMK	Persentase siswa putus sekolah
1	Kab. Bengkalis	33	29.257	0,11
2	Kab. Indragiri Hilir	9	20.692	0,04
3	Kab. Indragiri Hulu	2	18.463	0,01
4	Kab. Kampar	46	31.293	0,15
5	Kab. Kep.Meranti	1	6.426	0,02
6	Kab. Kuantan Singingi	3	14.161	0,02
7	Kab. Pelalawan	8	17.323	0,05
8	Kab. Rokan Hilir	33	29.381	0,11
9	Kab. Rokan Hulu	4	23.546	0,02
10	Kab. Siak	6	22.309	0,03
11	Kota Dumai	1	16.255	0,01
12	Kota Pekanbaru	1	60.701	0,00
	Total	**147**	**289.807**	**0,05**

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Grafik 3.3
Angka Putus Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2022



Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Dari tabel dan grafik tersebut diatas terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota yang realisasi/capaian APtS SM Sederajat berada jauh di atas rata-rata APtS Provinsi yaitu Kabupaten Bengkalis (0,11%), Kabupaten Kampar (0,15%) dan Kabupaten Rokan Hilir (0,11%), dengan capaian APtS tertinggi adalah Kabupaten Kampar sedangkan capaian APtS terendah adalah Kota Pekanbaru (0,00%).

B. Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI Bagian Kedua pasal 60 tentang Akreditasi, berbunyi sebagai berikut: I) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan; 2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik; dan 3) Akreditasi di lakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

Sejalan dengan hal di atas, dalam Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 50 dinyatakan hal-hal sebagai berikut: 1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan dan/atau program Pendidikan 2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan; 3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik oleh : (a) Pemerintah Pusat; dan/atau, (b) lembaga mandiri. Akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Tingkat ketercapaian sasaran strategis Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu siswa/peserta didik diukur/dilihat dari tingkat ketercapaian indikator kinerja utama yang ada dalam perjanjian kinerja, yaitu

1. **Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi**

   Adapun target dan pencapaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

   Indikator Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang terakriditasi digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran pemerataan dan akses pendidikan menengah, dicapai melalui program pendidikan menengah, dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\frac{\text{Jumlah SMA, SMK dan SLB yang Terakreditasi}}{\text{JumlahSeluruh Sekolah SMA,SMK dan SLB}} X\ 100\%$$

Dan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9

Target, Realisasi, Dan Capaian
Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kineja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi	94,12	92,59	98,37

sumber: Data Referensi Kemendikbud

Capaian Kinerja tahun 2022 sebesar 98,37% dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja sangat tinggi dan dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan pada tahun 2022 berhasil dicapai.

Adapun pencapaian Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi Provinsi Riau tahun 2022 terlihat pada tabel dan grafik berikut:

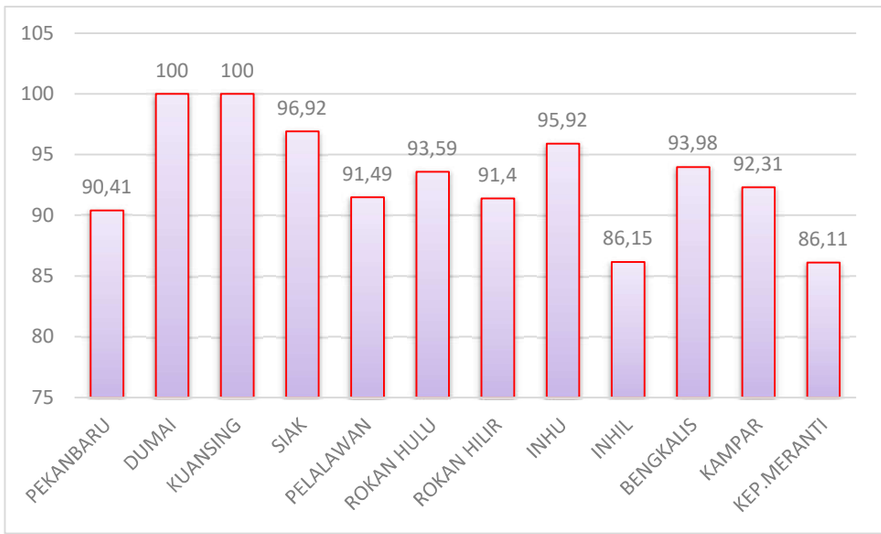
Tabel 3.10
Persentase Satuan Pendidikan
Menengah dan Pendidikan Khusus yang
Terakreditasi
se Provinsi Riau Tahun 2022

NO	KAB/KOTA	JUMLAH SMA, SMK DAN SLB	SMA, SMK, SLB TERAKREDITASI	PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS YANG TERAKREDITASI
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	PEKANBARU	146	132	90,41
2	DUMAI	35	35	100
3	KUANSING	35	35	100
4	SIAK	65	63	96,92

5	PELALAWAN	47	43	91,49
6	ROKAN HULU	78	73	93,59
7	ROKAN HILIR	93	85	91,4
8	INHU	49	47	95,92
9	INHIL	65	56	86,15
10	BENGKALIS	83	78	93,98
11	KAMPAR	91	84	92,31
12	KEP.MERANTI	36	31	86,11
	TOTAL	**823**	**762**	**92,59**

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Grafik 3.4
Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan
Pendidikan Khusus yang Terakreditasi
Kabupaten Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2022



Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Dari tabel 3.10 dan grafik 3.4 tersebut diatas terdapat 6 (enam) kabupaten/kota yang realisasi/capaian Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi berada jauh di bawah rata-rata Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi Provinsi Riau yaitu Kabupaten Indragiri Hilir (86,15%), Kabupaten Kepulauan Meranti (86,11%), Kabupaten Pelalawan (91,49%), Kabupaten Rokan Hilir (91,40%), Kota Pekanbaru (91,41%) Kabupaten Kampar (92,31%), dengan capaian Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi paling rendah adalah Kabupaten Indragiri Hilir (86,15%) sedangkan capaian Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi paling tinggi adalah Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Dumai sama – sama di angka (100%).

3.1.2 Membandingkan Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel. 3.11
Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu danbeberapa tahun terakhir

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2022	Realisasi Kineja 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1	2	3		7	8	6	7	8	9
1	Meningkatnya Akses Pendidikan	1	APK SM Sederajat	90,40	90,11	88,91	86,65	82,54	81,39
		2	APM SM Sederajat	66,36	66,43	66,02	66,86	66,02	66,43
		3	Angka Putus Sekolah SM Sederajat	0,74	0,05	0,94	0,76	1,34	2,10
2	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan	1	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi	94,12	92,59	96,15	95,17	93,85	92,00

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Data Capaian kinerja tersebut diatas menggambarkan bahwa :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus dengan 3(tiga) indikator pendukung yaitu APK SM Sederajat, APM SM Sederajat dan Angka Putus Sekolah SM sederajat. Realisasi kinerja tahun 2022 APK SM Sederajat sebesar 90,11% dengan Target 90,40%.

   Perbandingan realisasi indikator kinerja dalam 5 (lima) tahun terakhir untuk sasaran strategis Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus adalah sebagai berikut :

   a. APK SM sederajat

   Tabel dan grafik dibawah ini menggambarkan trend pencapaian angka partisipasi Kasar SM Sederajat Provinsi Riau pada 5 (lima) tahun terakhir :

Tabel. 3.12
Perbandingan Realisasi Indikator KinerjaAPK SM sederajat

Indikator Kinerja	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
APK SM Sederajat	81,39	82,54	86,65	88,91	90,11

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Dari tabel 3.15 diatas tren pencapaian Angka Partisipasi Kasar SM Sederajat Provinsi Riau pada 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Realisasi Untuk tahun 2018 sebesar 81,39%, tahun 2019 sebesar 82,54% dengan rasio peningkatan sebesar 1,15% dari tahun 2019. Realisasi untuk tahun 2019 sebesar 82,54% meningkat sebesar 2,26% dari tahun 2020 sebesar 86,65%. Realisasi untuk tahun 2021 sebesar 86,91% meningkat sebesar 0,26% dari tahun 2020 sebesar 86,65%. Realisasi untuk tahun 2022 sebesar 90,11% meningkat sebesar 1,2% dari tahun 2021 sebesar 88,91%

b. APM SM Sederajat

Tabel dan grafik dibawah ini menggambarkan tren pencapaian Angka Partisipasi Murni SM Sederajat Provinsi Riau pada 5 (lima) tahun terakhir :

Tabel. 3.13
Tabel Perbandingan Realisasi Indikator KinerjaAPM SM Sederajat

Indikator Kinerja	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
APM SM Sederajat	60,22	63,81	66,86	66,02	66,43

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Dari tabel diatas tren pencapaian Angka Partisipasi Murni SM Sederajat Provinsi Riau pada 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Realisasi Untuk tahun 2018 sebesar 60,22%, tahun 2019 sebesar 63,81% dengan rasio peningkatan sebesar 3,64% dari tahun 2018. Realisasi untuk tahun 2020 sebesar 66,86% meningkat 3,05% dari tahun 2019 sebesar 63,81%. Realisasi untuk tahun 2021 sebesar 66,02% mengalami penurunan sebesar 0,84% dari tahun 2020 sebesar 66,86% sedangkan untuk reliasasi tahun 2022

sebesar 66,43% mengalami kenaikan sebesar 0,41% dari tahun 2021 sebesar 66,02.

c. Angka Putus Sekolah SM Sederajat

Tabel dan grafik dibawah ini menggambarkan tren pencapaian angka Putus Sekolah SM Sederajat Provinsi Riau pada 5 (lima) tahun terakhir :

Tabel. 3.14
Tabel Perbandingan Realisasi Indikator
KinerjaAngka Putus Sekolah SM sederajat

Indikator Kinerja	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Putus Sekolah SM Sederajat	2,10	1,34	0,76	0,94	0,05

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Dari tabel 3.17 diatas trend pencapaian Angka Putus Sekolah SM Sederajat Provinsi Riau pada 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan pencapaian yang fluktuatif setiap tahunnya. Realisasi Angka Putus Sekolah untuk tahun 2018 sebesar 2,10%, tahun 2019 sebesar 1,34% dengan rasio peningkatan sebesar 3,44% dari tahun 2018. Realisasi Angka Putus Sekolah untuk tahun 2020 sebesar 0,76% Mengalami penuruan sebesar 0,58% dari tahun 2019 sebesar 1,34%. Di Tahun 2021 Angka Putus Sekolah naik kembali menjadi sebesar 0,94%, tahun 2022 sebesar 0.05% dengan rasio penurunan sebesar 0,89% dari tahun 2021 sebesar 0,94%. Indikator Angka Putus Sekolah semakin kecil semakin baik dalam mencerminkan partisipasi sekolah siswa dan meningkatan akses pendidikan menengah.

2. Sasaran strategis Meningkatnya Jumlah Persentase Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Yang Terakreditasi.

Tabel dan grafik dibawah ini menggambarkan trend pencapaian Persentase Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Yang Terakreditasi Provinsi Riau pada 5 (lima) tahun terakhir :

Tabel. 3.15
Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase
Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Yang Terakreditasi

Indikator Kinerja	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS YANG TERAKREDITASI	92,00	93,85	95,17	96,15	92,59

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Dari tabel 3.18 diatas tren pencapaian Persentase Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Yang Terakreditasi Provinsi Riau pada 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan pencapaian/tetap setiap tahunnya. Realisasi Persentase Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Yang Terakreditasi untuk tahun 2018 sebesar 92,00%, tahun 2019 sebesar 93,85% dengan rasio peningkatan sebesar 1,85% dari tahun 2018. Persentase Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Yang Terakreditasi untuk tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 95,17% dari tahun 2019 dengan rasio peningkatan sebesar 1,32%. Di Tahun 2021 mengalami peningkatan sebasar 96,15% dengan rasio Peningkatan sebesar 0,98% dan tahun 2022 sebesar 92,59% Persentase Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Yang Terakreditasi mengalami penurunan sebesar 3,56%.

3.1.3 Membandingkan Realisasi kinerja tahun ini dengan target Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Tabel 3.16
Realisasi kinerja tahun ini dengan target Renstra
Dinas Pendidikan Provinsi Riau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Perjanjian Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022 Terhadap Target Akhir
1	2	3			4	5	6
1	Meningkatnya Akses Pendidikan	1	APK SM Sederajat	90,40	92,40	90,11	97,52
		2	APM SM Sederajat	66,36	68	66,43	97,69
		3	Angka Putus Sekolah	0,74	0,7	0,94	74,47
2	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan	1	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi	94,12	94,92	92,59	97,55

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Dari tabel 3.16 diatas dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Akses Pendidikan dengan 3 (tiga) indikator pendukung yaitu APK SM sederajat, APM SM sederajat dan Angka Putus Sekolah SM sederajat. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan capaian terhadap target akhir renstra adalah sebagai berikut :

   a. APK SM sederajat

   Indikator Kinerja APK SM sederajat untuk realisasi tahun 2022 sebesar 90,11% dengan target akhir Renstra sebesar 92,40% dan capaian tahun 2022 terhadap target akhir sebesar 97,52

   b. APM SM sederajat

   Indikator Kinerja APM SM sederajat untuk realisasi tahun 2022 sebesar 66,43% dengan target akhir Renstra sebesar 68% dan capaian tahun 2022 terhadap target akhir sebesar 97,69%.

   c. Angka Putus Sekolah SM sederajat

   Indikator Kinerja Angka Putus Sekolah SM sederajat untuk realisasi tahun 2022 sebesar 0,94% dengan target akhir Renstra sebesar 0,7% dan capaian tahun 2022 terhadap target akhir sebesar 74,47%.

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan capaian terhadap target akhir renstra. Indikator Kinerja Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan untuk realisasi tahun 2022 sebesar 92,59% dengan target akhir Renstra sebesar 94,92% dan capaian tahun 2022 terhadap target akhir sebesar 97,55%.

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Data capaian kinerja sasaran Strategis meningkatnya Akses Pendidikan yang dapat dibandingkan dengan Nasional adalah indicator APK SM sederajat dimana target perjanjian Kinerja Tahun 2022 Mendikbudristek adalah sebagai berikut:

Tebal 3.17

Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Perjanjian Kinerja 2022	Realisasi PK 2022	Target/ Standar Nasional	Realisasi Nasional 2022
1	2	3		7	8	6	7
1	Meningkatnya Akses Pendidikan	1	APK SM Sederajat	90,40	90,11	88,39	97,52
		2	APM SM Sederajat	66,36	66,43	-	-
		3	Angka Putus Sekolah SM Sederajat	0,74	0,05	-	-
2	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan	1	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi	94,12	92,59	-	-

Target Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang sama dengan target Kinerja sasaran Program Kemendikbudristek adalah meningkatnya pemerataan layanan Pendidikan bermutu di seluruh jenjang dengan target indikator kinerja sasaran Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/SMLB/ Sederajat sebesar 88,39%. Jika dilihat realisasi PK 2022 Disdik Provinsi Riau indicator APK SM sederajat telah melampaui target APK SM sederajat standar Nasional yaitu sebesar 90,11%, namum jika dilihat dari realisasi APK SM sederajat Nasional tahun 2022 sebesar 97,52%, APK SM sederajat Provinsi Riau masih dibawah standar Nasional dengan rasion yaitu sebesar 7,41%. Berikut adalah trend capaian APK SM sederajat Provinsi dan Nasional dan APM SM sederajat Provinsi dan Nasional dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022:

a. APK (Angka Partisipasi Kasar)

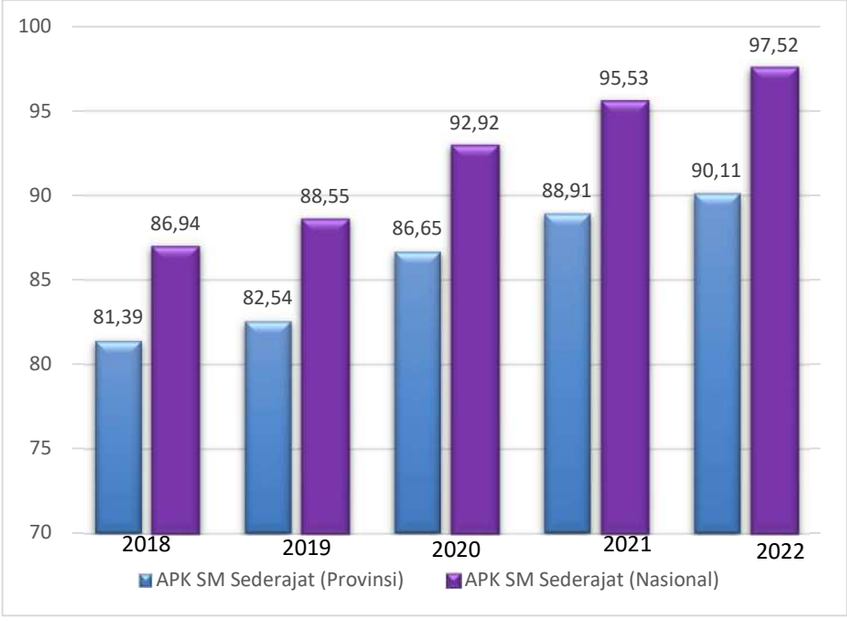
   berikut tabel dan grafik trend capaian Angka Partisipasi Kasar Provinsi Riau dan nasional 5 tahun terakhir

Tabel 3.18
Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional
Angka Partisipasi Kasar

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
APK SM Sederajat (Provinsi)	81,39	82,54	86,65	88,91	90,11
APK SM Sederajat (Nasional)	86,94	88,55	92,92	95,53	97,52

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Grafik 3.5
Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional
Angka Partisipasi Kasar



Tabel dan grafik tersebut mengambarkan hal – hal sebagai berikut:

1. APK SM sederajat baik Provinsi maupun Nasional Mengalami Kenaikan pada tahun 2018 hingga tahun 2022.
2. APK SM Provinsi di tahun 2018 (81,39%) mengalami kenaikan sebesar 1,15%, dari tahun 2019 (82,54) APK SM Provinsi di tahun 2020 (86,65%) Mengalami kenaikan sebesar (2,26%) dari tahun 2021 (88,91%) dan APK SM Sederajat Provinsi di tahun 2022 (90,11%) mengalami kenaikan sebesar (2,20%)
3. APK SM Sederajat Nasional mengalami kenaikan dari tahun 2018 hingga 2022

4. APK SM Nasional tahun 2018 (86,94%) ditahun 2019 mengalami kenaikan sebesar (1,61%) ditahun 2020 (92,92%) mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar (2,61%) dan ditahun 2022 APK SM Nasional sebesar (97,52%)
5. Pada Tahun 2022 Rata –Rata APK SM sederajat Provinsi (85,92%) masih dibawah APK SM sederajat Nasional (92,29%) terdapat selisih (6,37%)

b. APM (Angka Partisipasi Murni)

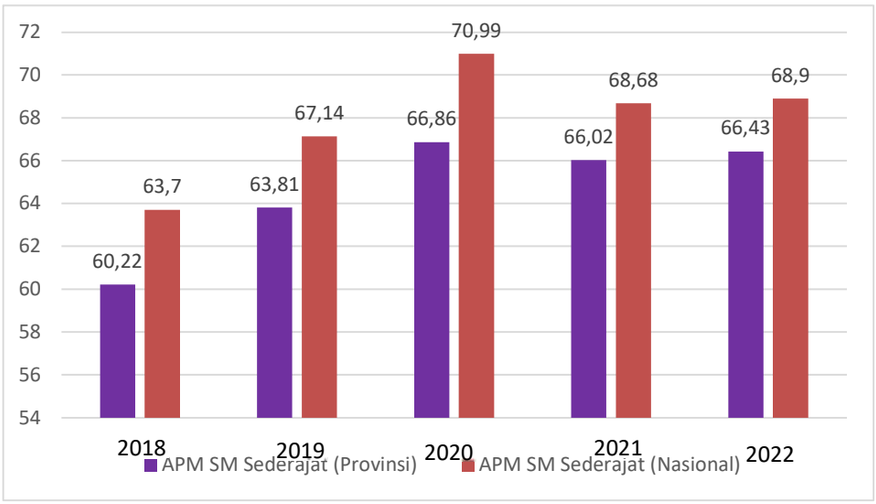
berikut tabel dan grafik trend capaian Angka Partisipasi Kasar Provinsi Riau dan nasional 5 tahun terakhir

Tabel 3.19
Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional Angka Partisipasi Murni

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
APM SM Sederajat (Provinsi)	60,22	63,81	66,86	66,02	66,43
APM SM Sederajat (Nasional)	63,70	67,14	70,99	68,68	68,90

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Grafik 3.6
Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional Angka Partisipasi Murni



Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Tabel dan grafik tersebut mengambarkan hal – hal sebagai berikut:

1. APM SM sederajat baik Provinsi maupun Nasional Mengalami Kenaikan pada tahun 2018 hingga tahun 2022.
2. APM SM Sederajat Provinsi di tahun 2018 (60,22%) mengalami kenaikan sebesar(3,59%), dari tahun 2019 (63,81%) APM SM sederajat Provinsi di tahun 2020 (66,86%) Mengalami Penurunan sebesar (-0,84%) dari tahun 2021 (66,02%) dan APM SM Sederajat Provinsi di tahun 2022 (66,43%) mengalami Kenaikan sebesar (0,41%)
3. APM SM Sederajat Nasional mengalami Penurunan di tahun 2022
4. APM SM Sederajat Nasional tahun 2018 (63,70%) ditahun 2019 mengalami kenaikan sebesar (3,14%) ditahun 2020 (70,99%) mengalami Penurunan pada tahun 2021 sebesar (-2,31%) dan ditahun 2022 APM SM Sederajat Nasional sebesar (86,90%)
5. Pada Tahun 2022 Rata –Rata APM SM Provinsi (64,66%) masih dibawah APM SM Nasional (67,88%) terdapat selisih (3,22%)

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.20
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2022	Realisasi Kineja 2022	Capaian Kinerja (%)
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya Akses Pendidikan	1	APK SM Sederajat	90,40	90,11	99,68
		2	APM SM Sederajat	66,36	66,43	100,11
		3	Angka Putus Sekolah SM Sederajat	0,74	0,05	1480,00
2	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan	1	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi	94,12	92,59	98,37

3.1.5.1 INDIKATOR 1 dan 2 : APK dan APM SM sederajat

A. Upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Kinerja Dinas PendidikanProvinsi Riau

Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk pemenuhan Akses Pendidikan dan Pemerataan Pendidikan

B. Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau

1. Kurangnya daya tampung Sekolah Menengah untuk lulusan SMP yang ingin melanjutkan ke Pendidikan Menengah dan bertambahnya jumlah penduduk
2. Belum tepatnya/alih fungsi sarana prasarana pendidikan di sekolah
3. Masih banyaknya sarana Prasarana Pendidikan dalam Kondisi Rusak
4. Masih terbatasnya satuan pendidikan menengah (SMA/SMK) pada daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau.
5. Faktor Ekonomi dan Kemiskinan
6. Terbatasnya Anggaran Daerah.

C. Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan Pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau

1. Membangun Unit Sekolah Baru (USB) pada tahun 2023 sebanyak 14 sekolah SMA dan 4 sekolah SMK dan menambah Ruang Kelas Baru (RKB) SMA pada tahun 2023 sebanyak 23 ruang dan SMK 52 ruang dan Pengadaan Mebel Sekolah SMA 158 Paket
2. Merehabilitasi Ruang Kelas yang rusak SMA 21 ruang dan SMK 3 sekolah
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan penyelenggaraan Sekolah Jarak Jauh (SMA Terbuka) berupa penambahan jumlah Tempat Kegiatan Belajar (TKB) dibeberapa daerah. Untuk tahun 2023 SMATER memiliki 12 TKB dan 1.024 siswa
4. Pemenuhan akses Pendidikan agar menjadi prioritas dalam pelaksanaan anggaran
5. Meningkatkan perolehan penerimaan DAK Fisik dari Pemerintah Pusat

3.1.5.2 INDIKATOR 3 : Angka Putus Sekolah SM Sederajat

A. Upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Peningkatan partisipasi sekolah dengan memberikan bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) dan pemberian bantuan

bagi siswa miskin (BSM) dan komunitas adat terpencil (KAT), Meningkatkan pelayanan pendidikan penyelenggaraan Sekolah Jarak Jauh (SMA Terbuka) berupa penambahan jumlah Tempat Kegiatan Belajar (TKB)

B. Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau

1. Faktor Ekonomi

   Ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam menopang biaya pendidikan yang berdampak terhadap masalah psikologi anak dan membuat anak memilih untuk bekerja. Meskipun bagi sekolah Negeri telah bebas pungutan/gratis namun mereka masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi perlengkapan belajar (tas, sepatu dan seragam sekolah) dan biaya untuk transportasi, uang jajan sehari-hari dan membeli buku tulis.

2. Pernikahan Usia Muda

   Merupakan Budaya dibeberapa daerah menikahkan anak pada usia dini dan kurangnya perhatian orang tua sehingga terjadi pergaulan bebas.

3. Fasilitas pembelajaran yang kurang memadai

   Fasilitas pembelajaran di sekolah yang kurang memadai seperti fasilitas yang tersedia (alat, bahan dan media), buku pelajaran dan sebagainya merupakan faktor ketiga penyebab anak putus sekolah. Kebutuhan dan fasilitas belajar yang dibutuhkan siswa tidak dapat dipenuhi dapat menyebabkan turunnya minat anak yang pada akhirnya menyebabkan putus sekolah. Meskipun bagi sekolah Negeri telah bebas pungutan/gratis namun mereka masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi perlengkapan belajar (tas, sepatu dan seragam sekolah) dan biaya untuk transportasi, uang jajan sehari-hari dan membeli buku tulis.

4. Kurang perhatian orang tua

   Kurangnya perhatian orang tua merupakan faktor kedua penyebab anak putus sekolah. Rendahnya perhatian orang tua terhadap anak dapat disebabkan karena kondisi

ekonomi keluarga atau rendahnya pendapatan orang tua anak, sehingga perhatian orang tua lebih banyak tercurah pada upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

5. Minat anak/Kenakalan Remaja

   Rendahnya Minat Anak dapat di sebabkan Oleh Perhatian orang tua yang kurang, jarak antara tempat tinggal anak dengan sekolah yang Jauh, Fasilitas belajar yang kurang dan Pengaruh Lingkungan Sekitarnya dan melakukan Kenakalan Remaja dan cenderung malas dalam mengikuti pelajaran dan pada akhirnya dikeluarkan oleh pihak sekolah atau berhenti dan tidak menyelesaikan sekolahnya.

6. Budaya

   Budaya adalah hal-hal yang terkait dengan kebiasaan masyarakat sekitarnya. Rendahnya kesadaran orang tua dan masyarakat akan pentingnya arti pendidikan. Perilaku masyarakat pedesaan dalam menyekolahkan anaknya lebih banyak dipengaruhi faktor lingkungan. Mereka beranggapan tanpa sekolahpun anak-anak mereka dapat hidup layak seperti anak lainnya yang bersekolah, oleh karena di desa jumlah anak yang tidak bersekolah lebih banyak dan mereka dapat hidup layak, maka kondisi seperti itu dijadikan landasan dalam menentukan masa depan anaknya. Pandangan banyak anak banyak rejeki membuat masyarakat di pedesaan lebih banyak mengarahkan anaknya yang masih usia sekolah untuk membantu orang tua dalam mencari nafkah.

7. Lokasi Sekolah

   Lokasi atau letak sekolah merupakan faktor keenam yang mampu menyebabkan anak putus sekolah. Jarak yang jauh dengan akses yang sulit merupakan hal hal yang harus dipertimbangkan oleh masyarakat untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya. Alat transportasi yang kurang serta jarak antara rumah dengan sekolah yang cukup jauh, akses yang sangat sulit dan keselamatan pun dianggap perlu dipertimbangkan.

8. **Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan Pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau**

1. Memberikan bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) dan optimalisasi dalam penggunaannya dengan kebijakan tidak ada pungutan oleh sekolah kepada siswa di Sekolah Negeri dan subsidi pembebasan/pengurangan biaya pada siswa tidak mampu di sekolah swasta
2. Pemberian bantuan bagi siswa miskin (BSM) dan komunitas adat terpencil (KAT) untuk memenuhi kebutuhan dasar siswa untuk bersekolah baik bersekolah di Negeri maupun swasta. Untuk bantuan bagi siswa miskin (BSM) dan komunitas adat terpencil (KAT) Tahun 2023 akan diberikan sebanyak 4.450 Siswa dan diharapkan akan semakin menurunnya angka putus sekolah karena faktor ekonomi.
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan penyelenggaraan Sekolah Jarak Jauh (SMA Terbuka) berupa penambahan jumlah Tempat Kegiatan Belajar (TKB), sehingga anak-anak yang menjadi tulang punggung keluarga dan jarak sekolah yang jauh karena faktor geofrafis tetap bisa belajar karena menggunakan pelayanan khusus. SMA Terbuka (SMATER) Tahun 2023 memiliki 12 TKB dan 1.024 Siswa dan akan dimungkinkan menambah Tempat Kegiatan Belajar.

3.1.5.3 INDIKATOR 4 : Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan pendidikan Khusus yang Terakreditasi

A. Upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Kinerja Dinas PendidikanProvinsi Riau

Peningkatan sarana dan prasarana sekolah dan peningkatan mutu/ kualitas pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta Penguatan kelembagaan atau satuan pendidikan oleh Pengawas Pendidikan

B. Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau

1. Adanya Penambahan Sekolah baru berdiri belum dapat diakreditasi dan belum memenuhi syarat yaitu SMA Swasta

8 Sekolah dan SMK Swasta 4 sekolah.

2. Ada 25 SMA/SMK negeri dan swasta itu tidak lulus akreditasi karena syarat automasi perpanjangan status akreditasi tidak lengkap dan merupakan Kelalaian dari pihak kepala sekolah dan jajaran manajemen yang ada di SMA/SMK negeri dan swasta yang tidak melengkapi data perpanjangan akreditasi sekolah mendaftar secara online, dan meng-uploud data-data sesuai dengan persyaratan yang tertulis di Isian Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) melalui aplikasi yang telah dikirimkan oleh BAN. Ada 23 SMA/SMK yang belum terverifikasi oleh pihak BAN dan sekolah yang terindikasi tutup tidak memiliki siswa.
3. Sinergi antara BAN Sekolah Madrasah, BAP sebagai lembaga akreditasi/penjaminan mutu dengan Dinas Pendidikan belum optimal.
4. Keterlambatan penyelesaian administrasi akreditasi dari satuan Pendidikan.
5. Masa berlakunya Akreditasi yang sudah habis, tetapi belum diakreditasi kembali oleh BAN-SM.
6. Kompetensi staf pada tingkat satuan pendidikan dalam membuat evaluasi diri sekolah (EDS) masih kurang.
7. Kemampuan sekolah dalam memenuhi 8 standar nasional pendidikan masih kurang.

3.1.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan.

Tabel 3.21
Realisasi Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Anggaran		
							Pagu	Realisasi	% Capaian
1	2	3		4	5	6=5/4x100%	8	9	10=9/8x100%
1	Meningkatnya Akses Pendidikan	1	APK SM Sederajat	90,40	90,11	99,68	**670.013.887.478**	**550.903.516.844**	**82,22**
		2	APM SM Sederajat	66,36	66,43	100,11	**670.013.887.478**	**550.903.516.844**	**82,22**
		1	Angka Putus Sekolah	0,74	0,05	1480,00	**924.218.498.781**	**678.800.667.927**	**73,45**
2	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan	1	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi	94,12	92,59	98,37	**14.529.142.529**	**12.623.286.509**	**86,88**

Dari Tabel 3.21 dapat dilihat bahwa pada sasaran strategis Meningkatnya Akses Pendidikan terdapat 3 (tiga) indikator Kinerja mendukung yaitu APK SM Sederajat, APM SM sederajat dan Angka Putus sekolah Indikator APK SM sederajat capaian kinerjanya tidak tercapai 100% dengan penggunaan Anggaran 82,22%. Sedangkan Kinerja APM SM sederajat dan Angka Putus Sekolah SM sederajat capaian kinerja nya melebihi target sampai 100% dan penyerapan anggarannya dapat ditekan kurang dari 100% dalam artian kinerja dapat dicapai dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat sehingga dapat dikatakan lebih efisien. Sedangkan pada sasaran strategis Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan, capaian Kinerjanya tidak tercapai 100% dengan penggunaan anggaran 86,88% sehingga belum bisa dikatakan efisien karena target kinerjanya tidak tercapai. Analisis efisiensi dilakukan bila capaian kinerja mencapai target yang telah ditentukan dengan penggunaan anggaran kurang dari anggaran yang tersedia.

Tebel 3.22

Tabel Tingkat Efisensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3		4	5	6=4-5
1	Meningkatnya Akses Pendidikan	1	APM SM Sederajat	100,11	82,22	17,88
		2	Angka Putus Sekolah SM Sederajat	1480,00	73,28	1406,72

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran meningkatnya akses Pendidikan cukup baik. Hal ini menunjukkan capaian kinerja Indikator APM SM sederajat sebesar 100,11% dapat tercapai dengan serapan anggaran sebesar 82,22% dengan tingkat efisiensi mencapai 17,88% dan untuk capaian indikator Angka Putus Sekolah SM sederajat sebesar 1480% dapat tercapai dengan serapan anggaran 72,28% dengan tingkat efisiensi mencapai 1406%

3.1.1 Analisis Program/kegiatan yang menunjang ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 3.23

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target	Anggaran	Anggaran	
												Rp	%
1	2	3	4	5	6=5/4x100%	7	8	9	10	11	12	13	14=9/8x100%
1	Meningkatnya	1 APK SM Sederajat	90,40	90,11	99,68	**Program Pengelolaan Pendidikan**							
						Kegiatan Pengelolaan Pendidikan					**114.304.369.020**	**99.824.549.591**	**87,33**
						Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah sekolah yang dibangun	2 Sekolah	1 Sekolah	50,00	3.750.000.000	1.306.754.581	**34,85**
						Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang kelas baru yg dibangun	62 ruang	124 ruang	200,00%	34.388.483.062	29.667.026.377	**86,27**
						Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yg di bangun	6 Ruang	8 Ruang	133,33%	5.097.207.117	4.430.404.448	**86,92**
						Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	jumlah Ruang Laboratorium Biologi yg dibangun	10 Ruang	10 Ruang	100,00	4.937.191.624	4.720.577.539	95,61
						Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	jumlah Ruang Laboratorium Fisika yg di bangun	11 Ruang	11 Ruang	100,00	4.614.088.351	4.553.407.188	98,68
						Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	jumlah Ruang Laboratorium Kimia yg dibangun	11 Ruang	11 Ruang	100,00	4.955.065.067	4.689.737.788	94,65
						Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	jumlah Ruang Laboratorium Komputer yg dibangun	4 Ruang	4 Ruang	100,00	1.980.248.054	1.680.495.131	84,86
						Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yg dibangun	10 Ruang	10 Ruang	100,00	4.031.846.624	3.889.496.513	96,47

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target	Anggaran	Anggaran	
												Rp	%
1	2	3	4	5	6=5/4x100%	7	8	9	10	11	12	13	14=9/8x100%
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yg dibangun	45 sekolah	134 sekolah	2,98	36.698.651.200	33.159.476.551	90,36
						Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah,Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yg dibangun	5 Ruang	5 Ruang	100,00	1.470.603.624	1.455.694.106	98,99
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas yg dibangun	26 ruang	26 Ruang	100,00	10.534.354.918	8.610.168.417	81,73
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah yg memperoleh pembinaan dan manajemen SMA	3 sekolah	431 sekolah	143,67	1.846.629.379	1.661.310.952	89,96
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					**50.094.254.273**	**46.431.147.071**	92,69
						Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas baru yg dibangun	56 Ruang	56 Ruang	100,00	**16.632.659.645**	**16.197.313.145**	97,38
						Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah ruang Praktek siswa yg dibangun	9 Ruang	9 Ruang	100,00	**12.001.030.860**	**11.814.158.360**	98,44
						Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah ruang laboratorium yg dibangun	17 Ruang	17 Ruang	100,00	**6.211.916.500**	**6.193.981.500**	99,71
						Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yg dibangun	5 Ruang	5 Ruang	100,00	**958.436.500**	**916.112.750**	95,58

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target	Anggaran	Anggaran	
												Rp	%
1	2	3	4	5	6=5/4x100%	7	8	9	10	11	12	13	14=9/8x100%
						Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yg dibangun	5 Ruang	5 Ruang	100,00	**2.191.857.500**	**2.157.110.000**	98,41
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yg dibangun	5 sekolah	24 sekolah	4,80	**9.498.825.327**	**7.017.755.640**	73,88
						Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas yg direhabilitasi	7 Ruang	3 Ruang	0,43	**439.999.997**	**398.083.370**	90,47
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah yg memperoleh pembinaan dan manajemen SMA	295 satuan pendidikan	340 satuan pendidikan	1,15	**2.159.527.944**	**1.736.632.306**	80,42
						Pengelolaan Pendidikan Khusus					**7.065.600.350**	**6.731.428.582**	95,27
						Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang dibangun	47 sekolah	5 sekolah	0,11	**2.584.406.579**	**2.559.036.579**	99,02
						Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yg di bangun	2 Ruang	2 Ruang	100,00	**312.246.201**	**312.246.201**	100,00
						Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yg dibangun	3 Ruang	3 Ruang	100,00	**450.003.493**	**450.003.493**	100,00
						Pembangunan Perpustakaan Sekolah	jumlah ruang pustaka yg dibangun	1 Ruang	1 Ruang	100,00	**293.059.297**	**272.713.297**	93,06
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah ruang sarasa prasarana dan utilitas yg dibangun	3 Ruang	3 Ruang	100,00	**609.345.567**	**597.330.567**	98,03
						Pembangunan Kantin Sekolah	jumlah kantin yg dibangun	6 Ruang	6 Ruang	100,00	**1.734.301.904**	**1.716.416.904**	98,97

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target	Anggaran	Anggaran	
													Rp	%
1	2	3		4	5	6=5/4x100%	7	8	9	10	11	12	13	14=9/8x100%
							Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	jumlah ruang bina persepsi	1 Ruang	2 Ruang	200,00	**356.360.811**	**348.230.811**	97,72
							Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah ruang Bina Diri dan bina gerak yg dibangun	1 Ruang	1 Ruang	100,00	**187.389.331**	**178.889.331**	95,46
							Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	jumlah ruang bina Pribadi dan sosial	3 Ruang	3 Ruang	100,00	**538.487.167**	**296.561.399**	55,07
		2	APM SM Sederajat	66,36	66,43	100,11	Program Pengelolaan Pendidikan					**670.013.887.478**	**550.903.516.844**	**82,22**
							Kegiatan Pengelolaan Pendidikan					**114.304.369.020**	**99.824.549.591**	
							Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah sekolah yang dibangun	2 Sekolah	1 Sekolah	50,00	3.750.000.000	1.306.754.581	**34,85**
							Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang kelas baru yg dibangun	62 ruang	124 ruang	200,00%	34.388.483.062	29.667.026.377	**86,27**
							Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yg di bangun	6 Ruang	8 Ruang	133,33%	5.097.207.117	4.430.404.448	**86,92**
							Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	jumlah Ruang Laboratorium Biologi yg dibangun	10 Ruang	10 Ruang	100,00	4.937.191.624	4.720.577.539	95,61
							Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	jumlah Ruang Laboratorium Fisika yg di bangun	11 Ruang	11 Ruang	100,00	4.614.088.351	4.553.407.188	98,68
							Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	jumlah Ruang Laboratorium Kimia yg dibangun	11 Ruang	11 Ruang	100,00	4.955.065.067	4.689.737.788	94,65
							Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	jumlah Ruang Laboratorium Komputer yg dibangun	4 Ruang	4 Ruang	100,00	1.980.248.054	1.680.495.131	84,86

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target	Anggaran	Anggaran	
												Rp	%
1	2	3	4	5	6=5/4x100%	7	8	9	10	11	12	13	14=9/8x100%
						Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yg dibangun	10 Ruang	10 Ruang	100,00	4.031.846.624	3.889.496.513	96,47
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yg dibangun	45 sekolah	134 sekolah	2,98	36.698.651.200	33.159.476.551	90,36
						Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yg dibangun	5 Ruang	5 Ruang	1,00	1.470.603.624	1.455.694.106	98,99
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas yg dibangun	26 ruang	26 Ruang	1,00	10.534.354.918	8.610.168.417	81,73
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah yg memperoleh pembinaan dan manajemen SMA	3 sekolah	431 sekolah	143,67	1.846.629.379	1.661.310.952	89,96
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					**50.094.254.273**	**46.431.147.071**	
						Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas baru yg dibangun	56 Ruang	56 Ruang	100,00	**16.632.659.645**	**16.197.313.145**	97,38
						Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah ruang Praktek siswa yg dibangun	9 Ruang	9 Ruang	100,00	**12.001.030.860**	**11.814.158.360**	98,44
						Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah ruang laboratorium yg dibangun	17 Ruang	17 Ruang	100,00	**6.211.916.500**	**6.193.981.500**	99,71

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target	Anggaran	Anggaran	
												Rp	%
1	2	3	4	5	6=5/4x100%	7	8	9	10	11	12	13	14=9/8x100%
						Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yg dibangun	5 Ruang	5 Ruang	100,00	**958.436.500**	**916.112.750**	95,58
						Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yg dibangun	5 Ruang	5 Ruang	100,00	**2.191.857.500**	**2.157.110.000**	98,41
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yg dibangun	5 sekolah	24 sekolah	4,80	**9.498.825.327**	**7.017.755.640**	73,88
						Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas yg direhabilitasi	7 Ruang	3 Ruang	0,43	**439.999.997**	**398.083.370**	90,47
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah yg memperoleh pembinaan dan manajemen SMA	295 satuan pendidikan	340 satuan pendidikan	1,15	**2.159.527.944**	**1.736.632.306**	80,42
						Pengelolaan Pendidikan Khusus					**7.065.600.350**	**6.731.428.582**	95,27
						Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang dibangun	47 sekolah	5 sekolah	0,11	**2.584.406.579**	**2.559.036.579**	99,02
						Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yg di bangun	2 Ruang	2 Ruang	100,00	**312.246.201**	**312.246.201**	100,00
						Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yg dibangun	3 Ruang	3 Ruang	100,00	**450.003.493**	**450.003.493**	100,00
						Pembangunan Perpustakaan Sekolah	jumlah ruang pustaka yg dibangun	1 Ruang	1 Ruang	100,00	**293.059.297**	**272.713.297**	93,06

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target	Anggaran	Anggaran	
													Rp	%
1	2	3		4	5	6=5/4x100%	7	8	9	10	11	12	13	14=9/8x100%
							Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah ruang sarasa prasarana dan utilitas yg dibangun	3 Ruang	3 Ruang	100,00	**609.345.567**	**597.330.567**	98,03
							Pembangunan Kantin Sekolah	jumlah kantin yg dibangun	6 Ruang	6 Ruang	100,00	**1.734.301.904**	**1.716.416.904**	98,97
							Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	jumlah ruang bina persepsi	1 Ruang	2 Ruang	200,00	**356.360.811**	**348.230.811**	97,72
							Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah ruang Bina Diri dan bina gerak yg dibangun	1 Ruang	1 Ruang	100,00	**187.389.331**	**178.889.331**	95,46
							Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	jumlah ruang bina Pribadi dan sosial	3 Ruang	3 Ruang	100,00	**538.487.167**	**296.561.399**	55,07
		1	Angka Putus Sekolah	0,74	0,05	1480,00	Program Pengelolaan Pendidikan					**924.218.498.781**	**678.800.667.927**	**73,45**
							Kegiatan Pengelolaan Pendidikan					**596.512.730.817**	**437.542.578.620**	**70,10**
							Pengelolaan Dana BOS Sekolah	Jumlah Sekolah	444 sekolah	444 sekolah	100,00%	**265.506.691.011**	**107.403.054.076**	**40,45**
							Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah yg pelayanan BOS SMA	444 sekolah	444 sekolah	100,00%	**331.006.039.806**	**330.139.524.544**	**99,74**
							Kegiatan Pengelolaan Pendidikan					**302.724.635.099**	**221.198.794.627**	**77,32**
							Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah yg pelayanan BOS SMK	295 sekolah	295 sekolah	100,00%	**179.750.435.099**	**98.273.960.968**	**54,67**
							Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah yg pelayanan BOS SMK	295 sekolah	295 sekolah	100,00%	**122.974.200.000**	**122.924.833.659**	**99,96**
							Pengelolaan Pendidikan Khusus					**24.981.132.865**	**20.059.294.680**	**88,12**
							Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah yg pelayanan BOS Pendidikan	47 Sekolah	47 Sekolah	100,00%	**14.158.470.370**	**9.331.241.190**	**65,91**
							Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah yg pelayanan BOS Pendidikan Khusus	47 Sekolah	47 Sekolah	100,00%	**4.713.800.000**	**4.713.800.000**	**100,00**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target	Anggaran	Anggaran	
													Rp	%
1	2	3		4	5	6=5/4x100%	7	8	9	10	11	12	13	14=9/8x100%
							Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik/SMATER)	Jumlah Sekolah yg menjalankan Program SMATER	47 satuan pendidikan	47 satuan pendidikan	100,00%	**6.108.862.495**	**6.014.253.490**	**98,45**
2	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan	1	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi	94,12	92,59	98,37	**Program Pengelolaan Pendidikan**					**168.889.568.789**	**12.623.286.509**	**7,47**
							Kegiatan Pengelolaan Pendidikan					**54.761.788.911**	**45.683.887.799**	
							Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah ruang sekolah yg mendapatkan Mebel	67 Ruang	198 Ruang	2,96	15.262.170.524	14.411.258.952	**94,42**
							Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta	Jumlah Paket alat praktek	56 paket	36 paket	0,64	8.854.913.328	8.413.845.930	**95,02**
							Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Orang yg mendapatkan biaya Personel	183 orang	105 orang	0,57	990.000.000	631.600.000	**63,80**
							Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah siswa yg mengikuti proses	6930 siswa	14845 siswa	2,14	12.443.913.323	9.459.069.478	**76,01**
							Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Orang yg mengikuti Pembinaan Minat Bakat dan kreativitas siswa	1732 orang	1535 orang	0,89	7.661.499.310	4.992.748.937	**65,17**
							Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah	Jumlah orang yg mengikuti karir pendidik dan	1148 orang	964 orang	0,84	9.549.292.426	7.775.364.502	**81,42**
							Kegiatan Pengelolaan Pendidikan					**84.846.533.054**	**77.072.161.648**	
							Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah ruang sekolah yg mendapatkan Mebel	98 Ruang	101 Ruang	1,03	**10.007.259.827**	**9.722.373.046**	**97,15**
							Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Paket alat praktek dan peraga siswa	27 paket	44 paket	1,63	**53.095.094.564**	**52.933.806.886**	**99,70**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target	Anggaran	Anggaran	
												Rp	%
1	2	3	4	5	6=5/4x100%	7	8	9	10	11	12	13	14=9/8x100%
						Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah siswa yg mengikuti proses belajar dan ujian bagi peserta didik	5805 siswa	809 siswa	0,14	**16.334.529.358**	**10.729.227.451**	**65,68**
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Orang yg mengikuti Pembinaan Minat Bakat dan kreativitas siswa	576 orang	269 orang	0,47	**3.406.674.907**	**2.479.691.050**	**72,79**
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah	Jumlah orang yg mengikuti karir pendidik dan	1277 orang	188 orang	0,15	**2.002.974.398**	**1.207.063.215**	**60,26**
						Pengelolaan Pendidikan Khusus					**28.774.668.194**	**26.376.216.992**	
						Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah ruang sekolah yg mendapatkan Mebel	7 Sekolah	7 Sekolah	100,00	**1.192.968.450**	**1.173.365.020**	**98,36**
						Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Paket alat praktek dan peraga siswa	47 Sekolah	47 Sekolah	100,00	**4.592.615.000**	**4.473.341.950**	**97,40**
						Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah siswa yg mengikuti proses belajar dan ujian bagi peserta didik	47 satuan pendidikan	47 satuan pendidikan	100,00	**14.022.563.899**	**12.215.452.113**	**87,11**
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Orang yg mengikuti Pembinaan Minat Bakat dan kreativitas siswa	44 cabang lomba	29 cabang lomba	0,66	**2.226.860.710**	**2.129.405.799**	**95,62**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target	Anggaran	Anggaran	
												Rp	%
1	2	3	4	5	6=5/4x100%	7	8	9	10	11	12	13	14=9/8x100%
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah orang yg mengikuti karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendiidkan Khusus	47 satuan pendidikan	47 satuan pendidikan	100,00	**6.739.660.135**	**6.384.652.110**	**94,73**
						Penetapan Kurikulum Muatan Lokal					**506.578.630**	**407.834.396**	
						Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah orang yg mengikuti Pelatihan Penyusunan kurikulum muatan Lokal Pendidikan Menengah	140 Orang	138 Orang	0,99	**506.578.630**	**407.834.396**	**80,51**

Dari tabel 3.22 diatas dapat dijelaskan bahwa Pada Indikator APK SM sederajat penyerapan anggaran Program Pengelolaan Pendidikan dengan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMA, Pengelolaan Pendidikan SMK, Pengelolaan Pendidikan Khusus sebesar 82,22%. Pada Indikator APM SM Sederajat penyerapan anggaran Program Pengelolaan Pendidikan dengan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMA, Pengelolaan Pendidikan SMK, Pengelolaan Pendidikan Khusus sebesar 82,22%. Pada Indikator Angka Putus Sekolah penyerapan anggaran Program Pengelolaan Pendidikan dengan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMA, Pengelolaan Pendidikan SMK, Pengelolaan Pendidikan Khusus sebesar 73,45%. Pada Indikator Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi penyerapan anggaran Program Pengelolaan Pendidikan dengan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMA, Pengelolaan Pendidikan SMK, Pengelolaan Pendidikan Khusus sebesar 88,89%.

3.1 REALISASI ANGGARAN

Anggaran sesuai Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2022 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Derah (APBD). Berikut Realisasi Anggaran dan penjelasannya :

Anggaran belanja Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2022 terbagi 3 (tiga) Program yaitu Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi, Program pengelolaan Pendidikan dan Program Pengembangan Kurikulum. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan mengedepankan prinsip efektifitas dan efisiensi, sehingga sampai dengan bulan Desember 2022 diperoleh capaian realisasi fisik dan daya serap keuangan. Analisis efisiensi dan efektifitas merupakan perbandingan capaian kinerja input terhadap output kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2022 yang dibiayai dari dana APBD Provinsi Riau. Sedangkan untuk rincian realisasi masing-masing pelaksanaan program Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2022 dengan total realisasi jumlah sebesar Rp. 2.052.688.883.363,- dan realisasi jumlah anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2.374.598.563.379,- dapat dilihat pada tabel 3.23 sebagai berikut :

Tabel 3.23
Realisasi Keuangan dan FisikDinas Pendidikan
Provinsi Riau

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	1.107.596.096.128,00	1.069.196.575.151,09	**96,53**	**100**
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	1.264.097.132.583,00	980.943.733.610,08	**77,60**	**99,39**
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	506.578.630,00	407.834.396,00	**80,51**	**80**
4	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.398.756.038**	**2.140.740.206**	**89,24**	100
	CABANG DINAS WILAYAH I	599.991.001,00	535.042.679,00	89,18	100
	CABANG DINAS WILAYAH II	599.995.887,00	497.342.299,00	82,89	100
	CABANG DINAS WILAYAH III	598.772.498,00	524.844.299,00	87,65	100
	CABANG DINAS WILAYAH IV	599.996.652,00	583.510.929,00	97,25	100
TOTAL		**2.374.598.563.379**	**2.052.688.883.363**	**85,97**	**94,85**

Sumber data: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan disdik bulan desember 2022

Adapun penjelasan mengenai Realisasi anggaran, sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan pagu anggaran dari Perjanjian Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

   - Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Riau ada Penambahan pagu Anggaran yang semula pagu anggaran Rp.1.085.534.541.869,- menjadi sebesar Rp.1.109.994.852.166,- yang disebabkan ada penambahan atas kekurangan penganggaran Gaji dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK) Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
   - Pada Program Pengalolaan Pendidikan ada penambahan pagu anggaran yang semula Rp.1.202.769.155.022,- menjadi sebesar Rp.1.264.097.132.583,- yang disebabkan ada penambahan dari Pemerintah Pusat Dana Alokasi khusus (DAK) Fisik dan non Fisik .

2. Efisiensi Dana Meliputi:
    - Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah
    - Efisiensi Dana Perjalanan Dinas
    - Efisiensi Dana Sisa Kontrak
3. Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan tidak dilaksanakan karena harga di pasar lebih tinggi dari harga DPA.
4. Sub Kegiatan USB (unit sekolah Baru) dari 2 (dua) unit sekolah baru yang rencana akan di bangun, hanya 1(satu) unit yang dibangun dan yang satunya lagi gagal Lelang.

Beberapa langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk mengatasi kendala penyerapan anggaran ini antara lain :

1. Menyusun aturan pola pelaksanaan kegiatan dengan mewajibkan kepada setiap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk melaksanakan kegiatan pada triwulan lebih awal, kecuali kegiatan-kegiatan yang dengan jadwal/kalender event nasional.
2. Meningkatkan kecermatan perencanaan yang diikuti dengan pengawasan yang ketat agar rencana kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasil guna secara maksimal.
3. Meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta ketetapan waktu pelaksanaan.
4. Melakukan percepatan penyiapan Dokumen untuk menghindari gagal lelang
5. Melakukan Proses Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai jadwal

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2022. Sebagai bagian dari pelaksanaan amanah, hasil-hasil ketercapaian tersebut harus disampaikan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) di dunia pendidikan. Laporan Kinerja Dinas Pendidikan tahun 2022 menyampaikan informasi capaian kinerja sasaran strategis dari tujuh program yang dilaksanakan Dinas Pendidikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2022. Ringkasan pengukuran kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau sesuai Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2022	Realisasi Kinerja 2022	Capaian Kinerja (%)
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya Akses Pendidikan	1	APK SM Sederajat	90,40	90,11	99,68
		2	APM SM Sederajat	66,36	66,43	100,11
		3	Angka Putus Sekolah SM Sederajat	0,74	0,05	1480,00
2	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan	1	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi	94,12	92,59	98,37

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2022 yang diukur berdasarkan 2 (dua) sasaran strategis yang telah ditetapkan dan 4 (Empat) indikator kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, rata-rata capaian kinerja keuangan Dinas Pendidikan tahun 2022 adalah sebesar 93,05%, dengan kategori

sangat tinggi. Keberhasilan atau kegagalan yang ada pada tahun 2022 atau tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan tahun 2019-2024, merupakan dasar berpijak bagi Dinas Pendidikan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan bidang pendidikan untuk tahun berikutnya sesuai rencana strategis yang telah ditetapkan.

Beberapa permasalahan dalam bidang pendidikan dan antara lain adalah Masih adanya kesenjangan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dikarenakan keterbatasan fasilitas pendidikan dan kesulitan menjangkau lokasi pendidikan, Adanya Kesenjangan Jumlah Siswa akibat adanya Sistem Zonasi, Sulitnya pembangunan bangunan Sekolah pada daerah-daerah terpencil dan terbatasnya jumlah siswa yang bersekolah di Daerah Terpencil, Masih rendahnya Jumlah Tenaga Pendidik di Daerah-Daerah Terpencil. Solusi yang akan dilakukan di tahun depan untuk mengatasi kendala/permasalahan yaitu Meningkatkan pelayanan pendidikan penyelenggaraan Sekolah Jarak Jauh (SMA Terbuka), Penambahan Ruang Kelas Baru dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Sistem Zonasi, Pemenuhan Akses Pendidikan agar menjadi prioritas dalam pelaksanaan anggaran, Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik.

4.2 LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS

Dinas Pendidikan pada masa mendatang akan mengambil langkah-langkah strategis, baik berupa perubahan, penyesuaian, dan pembaharuan dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang lebih baik di masa datang yaitu

1. Untuk meningkatan ketersediaan sarana dan prasarana Pendidikan melalui Kebijakan membangun USB dan RKB dan Meningkatkan Kualitas Ruang Kelas.
2. Untuk Meningkatkan Aksebiltas Layanan Pendidikan Melalui Kebijakan Pemenuhan operasional Sekolah dan Pendirian layanan khusus pendidikan (Sekolah menengah terbuka).
3. Untuk meningkatan kualitas pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik Melalui Kebijakan Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi dan berkompetensi, Meningkatkan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Meningkatkan pengembangan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik.

4. Untuk meningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang dan utilitas Pendidikan melalui kebijakan Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang dan utilitas pendidikan menengah dan Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang dan utilitas pendidikan layanan khusus.
5. Untuk meningkatan Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan melalui kebijakan Meningkatkan kerjasama pendidikan kejuruan dengan DUDI, Meningkatkan manajemen sekolah berbasis vokasi dan Meningkatkan sarana prasarana sekolah sesuai dengan kebutuhan DUDI

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

No.			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi Target	Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**100%**	**90,94%**	**90,94%**	**1.107.596.096.128**	**1.069.196.575.151**	**96,53%**
	1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** **Indikator : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**7 Dokumen**	**100%**	**100,00%**	**5.457.209.279**	**4.274.735.708**	**78,33%**
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%	3.964.538.539	3.074.320.810	77,55%
		2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	1.492.670.740	1.200.414.898	80,42%
	2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** **Indikator : Persentase Pemenuhan sarana Prasarana Aparatur**	**100%**	**100,00%**	**100,00%**	**1.085.824.465.280**	**1.051.536.537.866,00**	**96,84%**
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.894 Orang	7.894 Orang	100,00%	1.085.824.465.280	1.051.536.537.866	96,84%
	3		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** **Indikator : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi**	**80,00%**	**74,00%**	**92,50%**	**351.730.000**	**268.583.000**	**76,36%**
		1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	80,00%	74,00%	92,50%	351.730.000	268.583.000,00	76,36%
	4		**Administrasi Umum Perangkat Daerah 'Indikator : Persentase Pemenuhan**	**100%**	**100%**	**93,78%**	**4.812.949.997**	**3.701.695.745**	**76,91%**
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 jenis	9 jenis	100,00%	99.986.927	99.892.230	99,91%
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28 jenis	28 jenis	100,00%	1.936.709.570	1.730.876.478	89,37%
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,887 porsi	1,300 porsi	68,89%	418.768.000	274.748.000	65,61%
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20 Paket	20 Paket	100,00%	352.439.500	339.891.200	96,44%
		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	418 Laporan	418 Laporan	100,00%	2.005.046.000	1.256.287.837	62,66%
	5		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** **Indikator : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**100,00%**	**62,50%**	**668.990.723**	**343.793.000**	**51,39%**
		1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24 Unit	15 Unit	62,50%	668.990.723	343.793.000	51,39%
	6		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** **Indikator : Jumlah PNS dan Non PNS yang dilayani**	**404 Orang**	**404 Orang**	**100,00%**	**7.944.552.571**	**7.338.353.803**	**92,37%**
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000 surat	750 Surat	25,00%	50.000.000	10.000.000	20,00%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	2.171.620.612	1.846.610.797	85,03%
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	219 Orang	219 Orang	100,00%	5.722.931.959	5.481.743.006	95,79%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi Target	Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah **Indikator : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**87,78%**	**87,78%**	**2.536.198.278**	**1.732.876.029**	**68,33%**
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15 Unit	15 Unit	100,00%	343.480.000	254.773.898	74,17%
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Unit	12 Unit	100,00%	208.715.000	197.087.790	94,43%
	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45 Unit	23 Unit	51,11%	199.360.000	142.283.350	71,37%
	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15 ruang	15 ruang	100,00%	1.784.643.278	1.138.730.991,09	63,81%
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**63,43%**	**61,15%**	**97,27%**	**1.264.097.132.583,00**	**980.943.733.610,08**	**77,60%**
	indikator :						
	Angka partisipasi sekolah **Persentase anak berkubutuhan khusus yang mendapatkan Akses pendidikan** **Persentase Satuan Pendidikan Menengah yang terakreditasi Minimal B**	79,90%	77,32%	96,77%			
	Persentase anak berkubutuhan khusus yang mendapatkan Akses pendidikan	24,00%	23,98%	99,92%			
	Persentase Satuan Pendidikan Menengah yang terakreditasi Minimal B	86,38%	82,16%	95,11%			
	1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas **Indikator : Persentase SMA yang berakreditasi minimal B**	**91,87%**	**85,62%**	**93,20%**	**765.578.888.748**	**583.051.016.010**	**76,16%**
	1 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	2 Sekolah	1 Sekolah	50,00%	3.750.000.000	1.306.754.581	34,85%
	2 Penambahan Ruang Kelas Baru	62 ruang	124 ruang	200,00%	34.388.483.062	29.667.026.377	86,27%
	3 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	6 Ruang	8 Ruang	133,33%	5.097.207.117	4.430.404.448	86,92%
	4 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	10 Ruang	10 Ruang	100,00%	4.937.191.624	4.720.577.539	95,61%
	5 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	11 Ruang	11 Ruang	100,00%	4.614.088.351	4.553.407.188	98,68%
	6 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	11 Ruang	11 Ruang	100,00%	4.955.065.067	4.689.737.788	94,65%
	7 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	4 Ruang	4 Ruang	100,00%	1.980.248.054	1.680.495.131	84,86%
	8 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	10 Ruang	10 Ruang	100,00%	4.031.846.624	3.889.496.513	96,47%
	9 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	45 sekolah	134 sekolah	297,78%	36.698.651.200	33.159.476.551	90,36%
	10 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	5 Ruang	5 Ruang	100,00%	1.470.603.624	1.455.694.106	98,99%
	11 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	26 ruang	26 Ruang	100,00%	10.534.354.918	8.610.168.417	81,73%
	12 Pengadaan Mebel Sekolah	67 Ruang	198 Ruang	295,52%	15.262.170.524	14.411.258.952	94,42%
	13 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	56 paket	36 paket	64,29%	8.854.913.328	8.413.845.930	95,02%
	14 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	183 orang	105 orang	57,38%	990.000.000	631.600.000	63,80%
	15 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	6930 siswa	14845 siswa	214,21%	12.443.913.323	9.459.069.478	76,01%
	16 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1732 orang	1535 orang	88,63%	7.661.499.310	4.992.748.937	65,17%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Target	Realisasi Target	Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
		17	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1148 orang	964 orang	83,97%	9.549.292.426	7.775.364.502	81,42%
		18	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	3 sekolah	431 sekolah	14366,67%	1.846.629.379	1.661.310.952	89,96%
		19	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	444 sekolah	444 sekolah	100,00%	265.506.691.011	107.403.054.076	40,45%
		20	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	444 sekolah	444 sekolah	100,00%	331.006.039.806	330.139.524.544	99,74%
	1	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan** **Indikator : Persentase SMK yang berkareditasi Minimal B**		**85,56%**	**78,50%**	**91,75%**	**437.665.422.426**	**344.702.103.346**	**78,76%**
		1	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	56 Ruang	56 Ruang	100,00%	16.632.659.645	16.197.313.145,45	97,38%
		2	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	9 Ruang	9 Ruang	100,00%	12.001.030.860	11.814.158.360	98,44%
		3	Pembangunan Ruang Laboratorium	17 Ruang	17 Ruang	100,00%	6.211.916.500	6.193.981.500	99,71%
		4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	5 Ruang	5 Ruang	100,00%	958.436.500	916.112.750	95,58%
		5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	5 Ruang	5 Ruang	100,00%	2.191.857.500	2.157.110.000	98,41%
		6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5 sekolah	24 sekolah	480,00%	9.498.825.327	7.017.755.639,79	73,88%
		7	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	7 Ruang	3 Ruang	42,86%	439.999.997	398.083.369,84	90,47%
		8	Pengadaan Mebel Sekolah	98 Ruang	101 Ruang	103,06%	10.007.259.827	9.722.373.046	97,15%
		9	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	27 paket	44 paket	162,96%	53.095.094.564	52.933.806.886	99,70%
		10	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	5805 siswa	809 siswa	13,94%	16.334.529.358	10.729.227.451	65,68%
		11	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	576 orang	269 orang	46,70%	3.406.674.907	2.479.691.050	72,79%
		12	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1277 orang	188 orang	14,72%	2.002.974.398	1.207.063.215	60,26%
		13	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	295 satuan pendidikan	340 satuan pendidikan	115,25%	2.159.527.944	1.736.632.306	80,42%
		14	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	295 sekolah	295 sekolah	100,00%	179.750.435.099	98.273.960.968	54,67%
		15	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	295 sekolah	295 sekolah	100,00%	122.974.200.000	122.924.833.659	99,96%
	2	**Pengelolaan Pendidikan Khusus** **Indikator : Persentase Sekolah Pendidikian Khusus yang terakreditasi minimal B**		**72,34%**	**72,34%**	**100,00%**	**60.852.821.409**	**53.190.614.254**	**87,41%**
		1	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	47 sekolah	5 sekolah	10,64%	2.584.406.579	2.559.036.579	99,02%
		2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2 Ruang	2 Ruang	100,00%	312.246.201	312.246.201	100,00%
		3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3 Ruang	3 Ruang	100,00%	450.003.493	450.003.493,00	100,00%
		4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1 Ruang	1 Ruang	100,00%	293.059.297	272.713.297,00	93,06%
		5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3 Ruang	3 Ruang	100,00%	609.345.567	597.330.567,00	98,03%
		6	Pembangunan Kantin Sekolah	6 Ruang	6 Ruang	100,00%	1.734.301.904	1.716.416.904,00	98,97%
		7	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	1 Ruang	2 Ruang	200,00%	356.360.811	348.230.811	97,72%
		8	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak (D)	1 Ruang	1 Ruang	100,00%	187.389.331	178.889.331	95,46%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Target	Realisasi Target	Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
		9	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	3 Ruang	3 Ruang	100,00%	538.487.167	296.561.399	55,07%
		10	Pengadaan Mebel Sekolah	7 Sekolah	7 Sekolah	100,00%	1.192.968.450	1.173.365.020	98,36%
		11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	47 Sekolah	47 Sekolah	100,00%	4.592.615.000	4.473.341.950	97,40%
		12	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	47 satuan pendidikan	47 satuan pendidikan	100,00%	20.131.426.394	18.229.705.603	90,55%
		13	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	44 cabang lomba	29 cabang lomba	65,91%	2.226.860.710	2.129.405.799	95,62%
		14	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	47 satuan pendidikan	47 satuan pendidikan	100,00%	6.739.660.135	6.384.652.110	94,73%
		15	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	1 satuan pendidikan	1 satuan pendidikan	100,00%	31.420.000	23.674.000	75,35%
		16	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus		47 Sekolah	100,00%	14.158.470.370	9.331.241.190	65,91%
		17	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	47 Sekolah	47 Sekolah	100,00%	4.713.800.000	4.713.800.000	100,00%
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM **Indikator : Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal**			**80,00%**	**100,00%**	**125,00%**	**506.578.630**	**407.834.396**	**80,51%**
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah **Indikator : Jumlah kurikulum muatan lokal yang diimplementasi pada satuan pendidikan menengah**			**1 Kurikulum**	**1 Kurikulum**	**100,00%**	**506.578.630**	**407.834.396**	**80,51%**
		1	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	140 Orang	138 Orang	98,57%	506.578.630	407.834.396	80,51%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI **Indikator : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendidikan**						**2.398.756.038**	**2.140.740.206**	**89,24%**
	CABANG DINAS WILAYAH I						**599.991.001**	**535.042.679**	**89,18**
	1	**Administrasi Umum Perangkat Daerah** **Indikator : Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah**		**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100,00%**	**297.997.901**	**268.613.650**	**90,14%**
		1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 jenis	50 jenis	100,00%	59.997.901	59.202.500,00	98,67%
		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	960 porsi	960 porsi	100,00%	38.000.000	37.884.000,00	99,69%
		3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10 jenis	10 jenis	100,00%	15.000.000	11.543.400,00	76,96%
		4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	100 laporan	100,00%	185.000.000	159.983.750,00	86,48%
	2	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan** **Indikator : Jumlah PNS dan Non PNS Yang Dilayani**		**14 Orang**	**14 Orang**	**100,00%**	**213.995.600**	**179.834.030**	**84,04%**

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi Target	Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 rekening	3 rekening	100,00%	29.995.600	16.154.030,00	53,85%
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7 Laporan	7 Laporan	100,00%	184.000.000	163.680.000,00	88,96%
	3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah **Indikator : Persentase Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah Yang Dipelihara**	**100%**	**100%**	**100,00%**	**87.997.500**	**86.594.999**	**98,41%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	1 unit	100,00%	37.997.500	36.794.999,00	96,84%
	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	50.000.000	49.800.000,00	99,60%
	CABANG DINAS WILAYAH II				**599.995.887**	**497.342.299**	**82,89**
	1 Administrasi Umum Perangkat Daerah **Indikator : Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100,00%**	**366.437.155**	**268.148.283**	**73,18%**
	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42 jenis	42 jenis	100,00%	59.645.467	59.645.467,00	100,00%
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	400 porsi	400 porsi	100,00%	22.724.000	22.702.000,00	99,90%
	3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 jenis	4 jenis	100,00%	16.082.688	15.974.016,00	99,32%
	4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	105 Laporan	80,77%	267.985.000	169.826.800,00	63,37%
	2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah **Indikator : Jumlah PNS dan Non PNS Yang Dilayani**	**10 Orang**	**10 Orang**	**100,00%**	**142.308.232**	**138.178.360**	**97,10%**
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 rekening	2 rekening	100,00%	20.468.232	17.138.360,00	83,73%
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	4 Laporan	100,00%	121.840.000	121.040.000,00	99,34%
	3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah **Indikator : Persentase Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah Yang Dipelihara**	**100%**	**100%**	**100,00%**	**91.250.500**	**91.015.656**	**99,74%**
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	1 unit	100,00%	41.250.500	41.015.656,00	99,43%
	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	50.000.000	50.000.000,00	100,00%
	CABANG DINAS WILAYAH III				**598.772.498**	**524.844.299**	**87,65**
	1 Administrasi Umum Perangkat Daerah **Indikator : Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100,00%**	**344.275.296**	**279.695.441**	**81,24%**
	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55 jenis	55 jenis	100,00%	78.633.798	78.351.057,00	99,64%
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115 Porsi	115 Porsi	100,00%	26.626.600	20.778.600,00	78,04%
	3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 jenis	4 jenis	100,00%	24.154.898	23.483.284,00	97,22%
	4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	130 Laporan	100,00%	214.860.000	157.082.500,00	73,11%
	2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**13 Orang**	**13 Orang**	**100,00%**	**166.497.952**	**160.003.358**	**96,10%**

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Target	Realisasi Target	Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
			Indikator : Jumlah PNS dan Non PNS Yang Dilayani	**15 Orang**	**15 Orang**	**100,00%**	**100.431.952**	**100.000.000**	**99,61%**
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 rekening	2 rekening	100,00%	23.537.952	18.963.358,00	80,57%
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7 Laporan	7 Laporan	100,00%	142.960.000	141.040.000,00	98,66%
	3		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** **Indikator : Persentase Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah Yang Dipelihara**	**100%**	**100%**	**100,00%**	**87.999.250**	**85.145.500**	**96,76%**
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	1 unit	100,00%	37.999.250	35.145.500,00	92,49%
		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	50.000.000	50.000.000,00	100,00%
	CABANG DINAS WILAYAH IV						**599.996.652**	**583.510.929**	**97,25**
	1		**Administrasi Umum Perangkat Daerah** **Indikator : Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100,00%**	**306.009.507**	**305.840.757**	**99,94%**
		1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36 jenis	36 jenis	100,00%	63.191.473	63.191.473,00	100,00%
		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1300 porsi	1300 porsi	100,00%	20.098.000	20.098.000,00	100,00%
		3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 jenis	4 jenis	100,00%	14.965.034	14.965.034,00	100,00%
		4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79 Laporan	79 Laporan	100,00%	207.755.000	207.586.250,00	99,92%
	2		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** **Indikator : Jumlah PNS dan Non PNS Yang Dilayani**	**14 Orang**	**14 Orang**	**100,00%**	**209.159.995**	**196.079.904**	**93,75%**
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 rekening	2 rekening	100,00%	25.159.995	14.799.904,00	58,82%
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6 Laporan	6 Laporan	100,00%	184.000.000	181.280.000,00	98,52%
	3		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** **Indikator : Persentase Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah Yang Dipelihara**	**100%**	**100%**	**100,00%**	**84.827.150**	**81.590.268**	**96,18%**
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	1 unit	100,00%	34.827.150	31.590.268,00	90,71%
		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	50.000.000	50.000.000,00	100,00%
JUMLAH							**2.374.598.563.379**	**2.052.688.883.363,17**	**86,44**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **M. JOB KURNIAWAN, AP., M.Si**

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : **SYAMSUAR**

Jabatan : GUBERNUR RIAU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihakpertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Juli 2022

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
SYAMSUAR	**M. JOB KURNIAWAN, AP., M.Si** Pembina Utama Madya NIP. 19750528 199412 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akses Pendidikan	1. APK SM Sederajat	90,40
		2. APM SM Sederajat	66,36
		3. Angka Putus Sekolah SM Sederajat	0,74
2	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi	94,12

No	Program	Anggaran		Keterangan
1	2	3		4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	1.085.534.541.869,00	APBD
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	1.202.769.155.022,00	APBD
3	Program Pengembangan Kurikulum	Rp	506.578.630,00	APBD

Pekanbaru, Juli 2022

Pihak Kedua

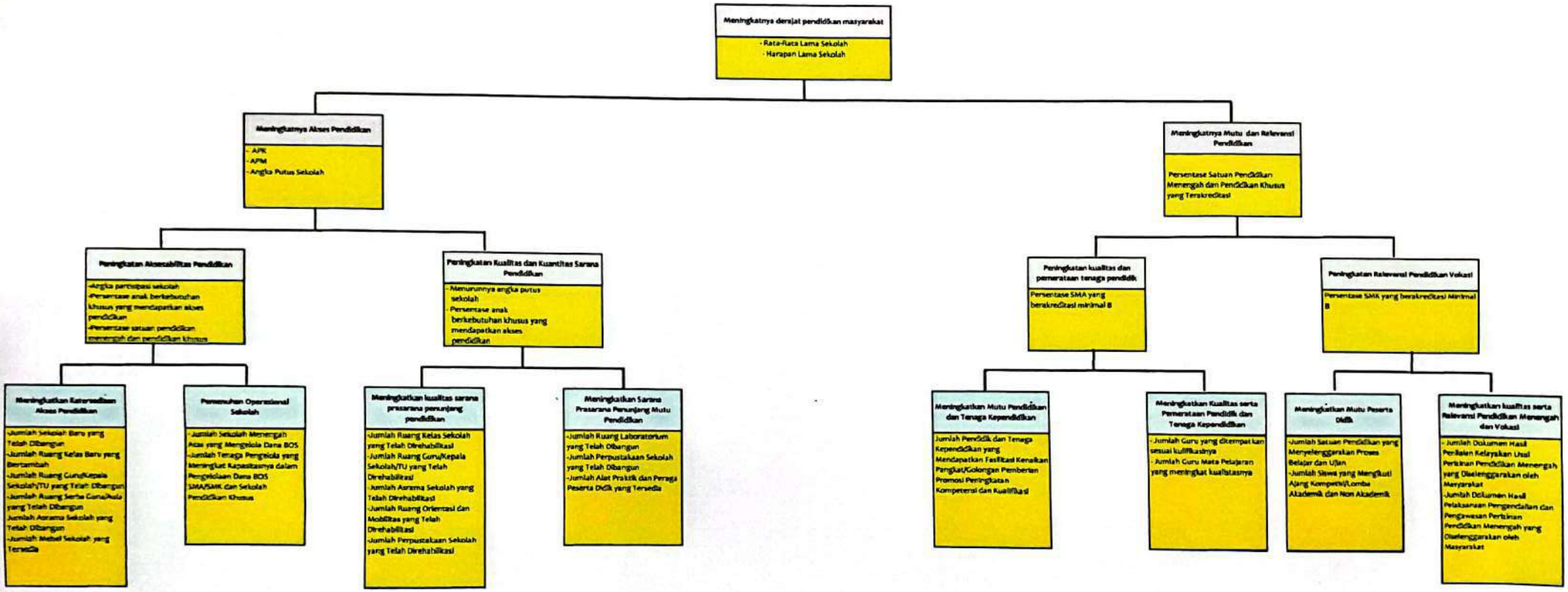
SYAMSUAR
Gubernur Riau

Pihak Pertama

M. JOB KURNIAWAN, AP., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19750528 199412 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PERUBAHAN PENJABARAN POHON KINERJA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU



Pekanbaru, Juli 2022
Plt. Dinas Pendidikan Provinsi Riau

M. JOB KURNIAWAN, AP., M.SI
Pembina Utama Madya
NIP. 19710528 199412 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN CUT NYAK DIEN NO. 3 TELP. 22552/21553
PEKANBARU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU
Nomor : Kpts...56.../2023

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau;

c. bahwa pejabat yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu serta memahami syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyususnan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (DPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2022 sebagaimana Diktum PERTAMA mempunyai Tugas sebagai berikut :
1. Mengumpulkan dan mengolah data Realisasi Indikator Renstra / IKU;
2. Menganalisa dan mengevaluasi Realisasi Data yang dibandingkan dengan Target Indikator Renstra;
3. Menyusun Dokumen LKJIP
4. Melaporkan hasil Pelaksanaan Tugasnya kepada Pimpinan OPD.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **PEKANBARU**
Pada tanggal : 6 Januari 2023

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU

M. JOB KURNIAWAN, AP, M.SI
Pembina Utama Madya
NIP. 19750528 199412 1 001

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU
Nomor : Kpts..56..../2023
Tanggal : 6 Januari 2023

SUSUNAN TIM
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	M. JOB KURNIAWAN, AP, M.Si NIP. 19750528 199412 1 001	Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU	PENANGGUNG JAWAB
2	TATI LINDAWATI, SH, M.Si NIP. 19660717 198603 2 002	SEKRETARIS	KETUA
3	M. HIDAYAT SYAH, S.STP. M.Si NIP. 19851203 200412 1 002	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN PROGRAM (PERENCANA AHLI MUDA)	SEKRETARIS
4	Drs. PAHMIJAN, M.Pd NIP. 19660205 199702 1 002	KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMA	ANGGOTA
5	DASRIL, M.Pd NIP. 19711207 199802 1 007	KEPALA BIDANG PENDATAAN & PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	ANGGOTA
6	FITRA JAYA PURNAMA, ST, MT NIP. 19781113 200501 1 003	KEPALA BIDANG PEMBINAAN PKPLK	ANGGOTA
7	Dr. ARDEN SIMERU, SP.d, M.Kom NIP. 19770807 200904 1 001	KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMK	ANGGOTA
8	SISKA ANJAROHANI, SE NIP. 19830329 201001 2 039	FUNGSIONAL PERENCANA AHLI PERTAMA	ANGGOTA
9	YENNY MARYATI, SE NIP. 19810130 200902 2 004	FUNGSIONAL UMUM PERENCANAAN PROGRAM	ANGGOTA
10	ROVI NOVITASARI, ST NIP. 19911105 201903 2 001	FUNGSIONAL UMUM PERENCANAAN PROGRAM	ANGGOTA
11	ALI SODIQ, SE NIP. -	TENAGA HONORER PERENCANAAN PROGRAM	ANGGOTA

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU

M. JOB KURNIAWAN, AP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19750528 199412 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend.Sudirman No. 460 Telepon (0761) 31222, 33617, 33746, 33749 Fax. (0761) 33477
PEKANBARU
Kode Pos : 28126

Pekanbaru, 6 Januari 2023

Nomor : 060/ORG.3/ 896
Lampiran : 5 (Lima) berkas
Sifat : Penting
Hal : Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022

Kepada :
Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan
2. Kepala Dinas Sosial
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor R/3419/PC.02/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 perihal Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022, bahwa pada tahun 2022 Ombudsman telah melaksanakan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik terhadap beberapa Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau.

Hasil penilaian yang dilaksanakan Ombudsman Provinsi Riau mendapatkan nilai 90.03 (Zona Hijau) dengan kategori A (Kualitas Tertinggi). Penyelenggaraan pelayanan publik dengan sistem penilaian yang terdiri dari 4 (empat) dimensi, yaitu; Dimensi Input, Dimensi Proses, Dimensi Output dan Dimensi Pengaduan. Rincian nilai kumulatif dan nilai per dimensi yang dinilai terhadap 4 (empat) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana terlampir.

Pemerintah Provinsi Riau memberikan apresiasi kepada Perangkat Daerah yang mendapatkan kumulatif penilaian tinggi dan bagi Perangkat Daerah yang nilainya masih rendah agar lebih ditingkatkan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

a.n GUBERNUR RIAU
SEKRETARIS DAERAH

Ir. S.F HARIYANTO, M.T
Pembina Utama
NIP. 19650430 198711 1 001

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran I : Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022
Nomor : 060/ORG.3/
Tanggal : Januari 2023

Pemerintah Daerah : Pemerintah Provinsi Riau
Periode Observasi : Agustus – November 2022

No	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input	Proses	Output	Pengaduan	
1	Dinas Pendidikan	18.61	30	23.64	18.89	91.14
2	Dinas Sosial	18.52	27.17	23.51	20.15	89.35
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.24	31.34	23.89	20.19	93.66
4	Kepala Dinas Kesehatan	16.73	27.42	23.77	18.06	85.97
Nilai Akhir dan Zona						90.03
Kategori						A
Opini						Kualitas Tertinggi

Keterangan kategori penilaian akhir:

Interval nilai	Kategori	Opini
88.00-100.00	A	Kualitas Tertinggi
78.00-87.99	B	Kualitas Tinggi
54.00-77.99	C	Kualitas Sedang
32.00-53.99	D	Kualitas Rendah
0-31.99	E	Kualitas Terendah

a.n GUBERNUR RIAU
SEKRETARIS DAERAH

Ir. S.F HARIYANTO, M.T
Pembina Utama
NIP. 19650430 198711 1 001

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran IV : Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022
Nomor : 060/ORG.3/ 806
Tanggal : 6 Januari 2023

RINCIAN HASIL PENILAIAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

Pemerintah Daerah : Pemerintah Provinsi Riau
Unit Layanan : Dinas Pendidikan

Dimensi Input-Penilaian Kompetensi

No	Indikator	Hasil Penilaian			
		Sekretaris Dinas	Kepala Bidang Pendataan	Fungsional Umum Bidang SMK	Petugas Layanan
1	Pengetahuan tentang komponen standar pelayanan	5	5	5	5
2	Pengetahuan terkait tugas dan kewenangan jabatan	5	5	5	5
3	Pengetahuan tentang lembaga Ombudsman	5	5	5	5
4	Pengetahuan tentang bentuk-bentuk maladministrasi	5	5	5	5
5	Pengetahuan tentang layanan yang ramah kelompok marginal/rentan	4	4	5	4

Dipindai dengan CamScanner

Dimensi Input-Penilaian Sarana Prasarana

No	Indikator	Hasil Penilaian
1	Frekuensi Pengawasan Internal	3
2	Ketersediaan jumlah petugas sesuai dengan Analis Beban Kerja (ABK)	4
3	Ketersedian kegiatan penjaminan mutu untuk pelayanan yang diberikan	3
4	Ketersedian jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	4
5	Ketersedian instrumen evaluasi kinetja pelaksana	5
6	Ketersedian dasar hukum atas standar pelayanan yang diterapkan	5
7	Ketersediaan sarana, prasaranan, dan fasilitas bagi pengguna layanan	5
8	Ketersedian sarana prasarana bagi pengguna dengan perlakuan khusus	2

Dipindai dengan CamScanner

Dimensi Proses - Penilaian Standar Pelayanan

No	Nama Produk	Indikator	Hasil Penilaian
1	Legalisir Ijazah Surat Tanda Belajar (STTB)	Ketersedian Persyaratan	5
2	Legalisir Ijazah Surat Tanda Belajar (STTB)	Ketersediaan Sistem Mekanisme dan Prosedur	5
3	Legalisir Ijazah Surat Tanda Belajar (STTB)	Ketersediaan Jangka Waktu Penyelesaian	5
4	Legalisir Ijazah Surat Tanda Belajar (STTB)	Ketersediaan Biaya/Tarif	5
5	Legalisir Ijazah Surat Tanda Belajar (STTB)	Ketersediaan Produk Pelayanan	5
6	Legalisir Ijazah Surat Tanda Belajar (STTB)	Maklumat Layanan Publikasi	5
7	Legalisir Ijazah Surat Tanda Belajar (STTB)	Maklumat Subtansi/Kualitas	5
8	Legalisir Ijazah Surat Tanda Belajar (STTB)	Pelayanan Khusus	5
9	Legalisir Ijazah Surat Tanda Belajar (STTB)	Ketersediaan Visi, Misi Pelayanan	5
10	Legalisir Ijazah Surat Tanda Belajar (STTB)	Ketersedian Moto Pelayanan	5
11	Legalisir Ijazah Surat Tanda Belajar (STTB)	Ketersediaan Atribut	2
12	Legalisir Ijazah Surat Tanda Belajar (STTB)	Ketersediaan Pelayanan Terpadu	4
13	Pelayanan Mutasi Siswa (keluarmasuk) antar kabupaten kota dan antar provinsi siswa SMA atau SMK atau SLB	Ketersediaan Persyaratan	5
14	Pelayanan Mutasi Siswa (keluarmasuk) antar kabupaten kota dan antar provinsi siswa SMA atau SMK atau SLB	Ketersediaan Sistem Mekanisme dan Prosedur	5
15	Pelayanan Mutasi Siswa (keluarmasuk) antar kabupaten kota dan antar provinsi siswa SMA atau SMK atau SLB	Ketersediaan Jangka waktu Penyelesaian	5

Dipindai dengan CamScanner

No	Nama Produk	Indikator	Hasil Penilaian
16	Pelayanan Mutasi Siswa (keluarmasuk) antar kabupaten kota dan antar provinsi siswa SMA atau SMK atau SLB	Ketersediaan Biaya/Tarif	5
17	Pelayanan Mutasi Siswa (keluarmasuk) antar kabupaten kota dan antar provinsi siswa SMA atau SMK atau SLB	Ketersediaan Produk Pelayanan	5
18	Pelayanan Mutasi Siswa (keluarmasuk) antar kabupaten kota dan antar provinsi siswa SMA atau SMK atau SLB	Maklumat Layanan Publikasi	5
19	Pelayanan Mutasi Siswa (keluarmasuk) antar kabupaten kota dan antar provinsi siswa SMA atau SMK atau SLB	Maklumat Subtansi/Kualitas	5
20	Pelayanan Mutasi Siswa (keluarmasuk) antar kabupaten kota dan antar provinsi siswa SMA atau SMK atau SLB	Pelayanan Khusus	5
21	Pelayanan Mutasi Siswa (keluarmasuk) antar kabupaten kota dan antar provinsi siswa SMA atau SMK atau SLB	Ketersediaan Visi, Misi Pelayanan	5
22	Pelayanan Mutasi Siswa (keluarmasuk) antar kabupaten kota dan antar provinsi siswa SMA atau SMK atau SLB	Ketersediaan Moto Pelayanan	5
23	Pelayanan Mutasi Siswa (keluarmasuk) antar kabupaten kota dan antar provinsi siswa SMA atau SMK atau SLB	Ketersediaan Atribut	2
24	Pelayanan Mutasi Siswa (keluarmasuk) antar kabupaten kota dan antar provinsi siswa SMA atau SMK atau SLB	Ketersediaan Pelayanan Terpadu	4

Dipindai dengan CamScanner

Dimensi Output-Penilaian Persepsi

Responden	Profesi Responden	Hasil Penilaian				
		Indikator				
		Penundaan Berlarut	Permintaan Imbalan	Penyimpangan Prosedur	Tidak Kompeten	Tidak Patut
Responden-1	Lainnya	5	5	5	5	5
Responden-2	Guru	5	5	5	5	5
Responden-3	Pelajar/ Mahasiswa	4	5	5	5	5
Responden-4	Pensiunan	5	5	5	5	5
Responden-5	Wiraswasta	5	5	5	5	5
Responden-6	Karyawan Honorer	5	5	5	5	5
Responden-7	Wiraswasta	3	5	4	5	5

Dipindai dengan CamScanner

Dimensi Pengaduan - Penilaian Pengelolaan Pengaduan

No	Indikator	Hasil Penilaian
1	Penyelenggara pelayanan melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan pengaduan	5
2	Pengelola yang kompeten untuk melaksanakan fungsi pengelolaan pengaduan	5
3	Penyelenggara wajib melakukan pembinaan terhadap pengelola	2
4	Penyelenggara pelayanan melaksanakan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan	5
5	Jangka waktu penyelesaian pengaduan	2
6	Penyelenggara pelayanan menyediakan sarana pengaduan	5
7	Pelaksanaan penyelesaian pengaduan - pengaduan diterima	31
8	Pelaksanaan penyelesaian pengaduan - pengaduan diselesaikan	31

a.n GUBERNUR RIAU
SEKRETARIS DAERAH

Ir. S.F. HARIYANTO, M.T
Pembina Utama
NIP. 19650430 198711 1 001

Dipindai dengan CamScanner

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 115 /PC.02/I/2022 18 Januari 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021

Kepada Yth.
Gubernur Riau
di
Tempat

Bersama ini disampaikan bahwa guna percepatan penilaian kualitas pelayanan publik dan sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Ombudsman Republik Indonesia mendorong penyelenggara pelayanan publik mematuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Atas hal tersebut, Ombudsman Republik Indonesia melaksanakan penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik dan hasil penilaian kepatuhan diharapkan menjadi acuan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan terhadap produk pelayanan administrasi di **Pemerintah Provinsi Riau, dari 37 produk layanan administrasi diperoleh nilai 98.12 dan masuk dalam Zona Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tinggi** sebagaimana rincian terlampir.

Terhadap hasil penilaian tersebut, Ombudsman Republik Indonesia menyarankan agar Saudara:

a. Memberikan apresiasi kepada pimpinan unit pelayanan publik yang memperoleh Predikat Kepatuhan Tinggi sebagai bentuk penghargaan atas komitmen dan upaya dalam memenuhi komponen standar pelayanan.
b. Memantau konsistensi tingkat kepatuhan dalam implementasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik khususnya dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Ombudsman Republik Indonesia,

Mokhammad Najih

Nilai Kepatuhan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2021

Pemerintah Daerah : Pemerintah Provinsi Riau
Periode Observasi : 01 June 2021 Sampai 16 March 2022
Tanggal Generate : 16 February 2022

No.	Nama Unit Layanan	Produk Layanan		Nilai
1	Dinas Pendidikan	1	Layanan Mutasi Siswa	93.89
		2	Surat Keterangan Pengganti STTB/IJAZAH/DANEM/SKHU/SKYBS	93.89
		3	Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	93.89
		4	Rekomendasi Mutasi	93.89
		5	Pembuatan Kartu Pegawai	93.89
		6	Pengesahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)	93.89
		7	Legalisir STTB/IJAJAH/DANEM/SKHU/SKYBS	93.89
		8	Pelayanan Dapodik	93.89
		9	Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah	93.89
		10	Penetapan Angka Kredit	93.90
Nilai Rata-Rata				**93,90**
Zona Kepatuhan				**Hijau**

Keterangan Kategorisasi Penilaian Pemerintah Daerah:

Nilai	Tingkat Kepatuhan	Zona
0 - 50.99	Rendah	Merah
51.00 - 80.99	Sedang	Kuning
81.00 - 100	Tinggi	Hijau


Pemerintah Provinsi Riau


PREDIKAT KEPATUHAN
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
TAHUN 2022
Pemerintah Provinsi Riau


PENERIMA ANUGERAH PREDIKAT KEPATUHAN
PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2022
TINGKAT PEMERINTAH PROVINSI
PERINGKAT 1
PERINGKAT 2
PERINGKAT 3
PERINGKAT 4
PERINGKAT 5
PERINGKAT 6
PERINGKAT 7
PERINGKAT 9
PERINGKAT 10